

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 5.1.1 Sejarah Desa

Berdasarkan cerita dari sesepuh desa Pait, penamaan desa Pait berasal dari adanya pohon pelem besar yang ada pada masa silam tepatnya pada zaman Diponegoro. Seiring waktu pohon pelem besar tersebut berbuah. Kemudian datanglah beberapa orang dari perjalanan jauh, pada saat melihat pohon besar tersebut, rombongan tersebut beristirahat di bawah naungan pohon. Karena sangat lelah dan lapar, ketika rombongan tersebut melihat buah dari pohon besar itu mereka segera memetik buah tersebut. Namun ketika mereka menyantap buah tersebut, ternyata buahnya sangat pait. Berawal dari peristiwa itulah, maka wilayah tempat tumbuhnya pohon pelem besar itu dinamakan Desa Pait. Secara fisiologis, memang pertumbuhan pohon pelem disini kurang bagus, pada saat buah pelem masih kecil terkena alat buah sehingga produksinya buruk. Dari segi hawa dan iklim pun juga tidak mendukung.

#### 5.1.2 Keadaan Lahan untuk Penggunaannya

Dari luasan lahan yang ada di Desa Pait terbagi menjadi beberapa areal wilayah. Pembagian areal di wilayah penelitian dapat dilihat dalam tabel ... berikut:

Tabel 17: Pembagian area di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang

No	Pembagian Areal	Luas Lahan (Ha)	(%)
1.	Pekarangan	45,3	2,8
2.	Sawah	168,2	10,4
3.	Tegalan	281,5	17,3
4.	Hutan	1126,7	69,5
<b>Jumlah</b>		<b>1621,7</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Monografi Desa Pait, 2012*

Dari tabel 20 diatas dapat diketahui bahwa Desa Pait memiliki luas wilayah 1621,7 Ha. Penggunaan areal untuk pekarangan seluas 45,3 Ha atau 2,8% dari total areal, sawah 168,2 Ha atau 10,4% dari total areal, tegalan seluas 281,5 Ha atau 17,3% dari total areal, dan hutan seluas 1126,7 Ha atau 69,5% dari total areal. Dilihat dari tabel diatas, luas hutan menduduki peringkat 1 dari ke empat pembagian areal untuk pekarangan, sawah, dan tegalan, ini menunjukkan bahwa

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Desa Pait, bergantung dari sumber daya hutan. Selain itu, dari tabel pembagian areal di atas, mampu menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pait bermukim di areal sekitar hutan.

### 5.1.3 Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Pait terbagi di dalam 25 Rukun Tetangga ( RT ) dan 6 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 5 (lima) Dusun yaitu:,Dusun Slatri, Dusun Bonjagung, Dusun Pait Lor, Dusun Baraan, dan Dusun Tangkil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Berikut ini adalah pembagian wilayah desa secara detail :

Tabel 18: Pembagian Wilayah Desa

a.	Dusun Slatri	:	Terdiri dari	RW	2	RT	8
b.	Dusun Bonjagung	:	Terdiri dari	RW	1	RT	4
c.	Dusun Pait Lor	:	Terdiri dari	RW	1	RT	4
d.	Dusun Baraan	:	Terdiri dari	RW	1	RT	6
e.	Dusun Tangkil	:	Terdiri dari	RW	1	RT	3

### 5.1.4 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data sekunder dari kantor Desa Pait tahun 2012 jumlah penduduk keseluruhan tercatat sebanyak 4419 jiwa yang terdiri dari 2221 jiwa penduduk laki-laki atau 50,24% dan 2198 jiwa penduduk perempuan atau 49,76% dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1225 Kepala Keluarga (KK) dengan 635 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam garis kemiskinan.

### 5.1.5 Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Pait sebagian besar adalah sebagai petani, hal ini mungkin dikarenakan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di daerah sekitar yang memungkinkan masyarakat setempat untuk memanfaatkannya sedangkan penduduk yang bekerja pada bidang lain bervariasi mulai dari pegawai sampai dengan usaha sendiri.

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian bertujuan untuk mengetahui gambaran peranan aktivitas penduduk dalam rangka memenuhi

kebutuhan hidupnya juga untuk mengetahui gambaran peranan berbagai usaha ekonomi yang menunjang kehidupan masyarakat. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19: Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	(%)
1.	Petani	3.992	77,70
2.	Buruh Tani	775	15,08
3.	Pegawai Negeri	45	0,88
4.	Pegawai Swasta	135	2,63
5.	Usaha Sendiri	191	3,72
<b>Jumlah</b>		<b>5138</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Monografi Desa Pait, 2012

Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Pait sebagian besar adalah disektor pertanian, tercatat sebanyak 3.992 orang atau 77,70% penduduk usia produktif bekerja disektor pertanian, sebagai Buruh Tani sebanyak 775 orang atau 15,08% sedangkan yang lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri sebesar 45 orang atau 0,88%, Pegawai Swasta sebanyak 135 orang atau 0,88%, dan Usaha Sendiri sebanyak 191 orang atau 3,72% dari total penduduk yang bekerja.

Dari kelima kelompok tersebut, mata pencaharian mayoritas masyarakat di Desa Pait adalah sebagai petani. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian, terutama tanah hutan seluas 1126,7 Ha. Sehingga kebanyakan dari masyarakat Desa Pait yang bekerja sebagai petani di tanah hutan. Selanjutnya mata pencaharian minoritas yaitu sebagai pegawai negeri, dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Pait masih terbatas dalam menerima sarana pendidikan, maka hanya orang tertentu yang bisa diterima bekerja sebagai pegawai negeri.

### 5.1.6 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Tinggi rendahnya pendidikan menentukan pola pikir dan cara mengambil keputusan dari suatu masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang diterima maka semakin tinggi pula pengetahuan yang dimilikinya. Tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat Desa Pait sangat beragam, hal ini yang akan mempengaruhi kemampuan dalam menerima dan menerapkan teknologi baru yang dapat berguna bagi pengembangan

usahatani, khususnya usahatani di kawasan hutan. Diharapkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempermudah seseorang dalam menerima sebuah inovasi baru. Penduduk Desa Pait mempunyai tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan kesempatan dalam memperoleh fasilitas pendidikan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 20 berikut:

Tabel 20: Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	(%)
1.	Tidak Sekolah	496	11,7
2.	TK/ sederajat	205	4,84
3.	SD/ sederajat	2.708	63,90
4.	SLTP/ sederajat	487	11,49
5.	SLTA/ sederajat	324	7,64
6.	Sarjana/ sederajat	18	0,42
<b>Jumlah</b>		<b>4238</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Monografi Desa Pait, 2012

Dari tabel 23 diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Pait masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk yang tidak bersekolah sebanyak 496 orang atau 11,7%, hanya tamatan TK/ sederajat sebanyak 205 orang atau 4,84%, tamatan SD/ sederajat sebanyak 2708 orang atau 63,90%. Sedangkan tamatan SLTP/ sederajat sebanyak 487 orang atau 11,49% untuk tamatan SLTA/ sederajat sebanyak 324 orang atau 7,64% sementara untuk tamatan Sarjana/ sederajat sebanyak 18 orang atau 0,42%.

Kondisi yang mendukung rendah tingginya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Candi antara lain disebabkan kesadaran masyarakat dalam mengenal pentingnya pendidikan, keadaan ekonomi masyarakat, selain itu ada tidaknya fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat pendidikan yang tinggi.

## 5.2 Sejarah PHBM desa Pait

Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai

BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan lahirnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

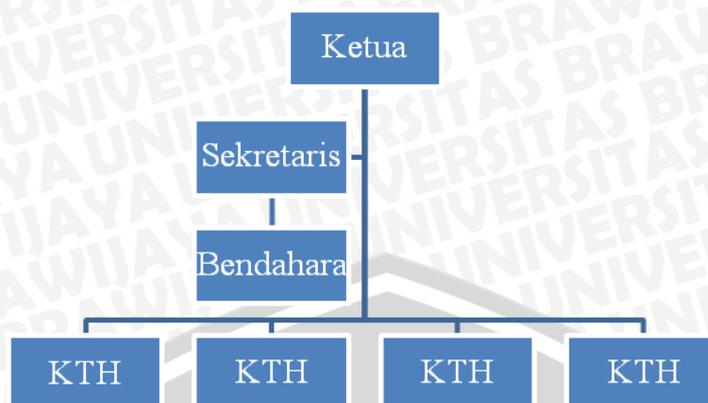
PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara.

Pada mulanya PHBM di desa Pait merupakan tidak lanjut dari SK Perum Perhutani sebagai pengelolaan hutan Negara di pulau Jawa pada tahun 2001. PHBM di desa pait ini mulai berjalan pada pertengahan tahun 2002. Selain mengusung visi dan misi dari dinas Perum Perhutani, PHBM desa Pait ini juga memiliki keinginan-keinginan antara lain: untuk menjaga keamanan dan memperbaiki kondisi hutan akibat dari penjarahan kayu pada era krisis tahun 1998, ke-dua agar masyarakat desa Pait bisa memanfaatkan lahan sekitar hutan untuk dijadikan pekerjaan sehari-hari sehingga masyarakat sekitar tidak mengalami kelaparan dan bisa memanfaatkan keberadaan hutan dengan baik, ke

tiga mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan petugas Perum Perhutani sehingga apa yang menjadi tujuan masyarakat dan perum perhutani bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik itu perum perhutani maupun masyarakat sekitar hutan, dan yang terakhir melindungi masyarakat desa Pait dalam berbagai aktivitas dalam pengelolaan hutan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sistem PHBM. LMDH merupakan lembaga yang berbadan hukum, mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART).

Dengan berjalannya waktu pihak Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan membentuk sebuah lembaga. Lembaga bentukan masyarakat dengan pihak Perum Perhutani dinamakan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Lembaga ini dibentuk sesuai dengan kesepakatan anggota, dengan dibentuknya lembaga ini diharapkan nantinya bisa menampung aspirasi dan keluhan-keluhan anggota yang menjadi problem keberlangsungan program PHBM. Sehingga dengan adanya lembaga ini bisa mempermudah dalam proses keberlanjutan dan keberhasilan program PHBM yang ada di desa Pait. Sampai pada waktu penelitian ini, kepengurusan LMDH ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun dan sudah dua kali melakukan proses pemilihan pengurus. Untuk struktur kepengurusan LMDH pada saat ini dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2: Struktur Organisasi LMDH

### 5.3 Partisipasi Masyarakat dalam program PHBM

#### 5.3.1 Partisipasi Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahapan paling penting dalam kegiatan PHBM dikarenakan, pada tahap ini dilakukan persiapan atas segala sesuatu yang akan disepakati dan dijalani. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam pembentukan LMDH dan kontrak kerja. Kegiatan pembentukan LMDH terdiri dari pemberian undangan, presentase kehadiran, penentuan jumlah anggota, penetapan jumlah anggota, penentuan kordinator LMDH, dan pemilihan kordinator LMDH. Sedangkan pada tahap kontrak kerja antara lain meliputi kegiatan pembuatan kontrak kerja, mempelajari kontrak kerja, pensosialisasian kontrak kerja, penanda tangan kontrak kerja, implementasi kontrak kerja dan evaluasi kontrak kerja.

Pentingnya partisipasi pada tahap perencanaan akan menentukan langkah untuk tahap selanjutnya baik pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengawasan. Untuk itu diperlukan kehadiran semua pihak mulai dari Perum Perhutani, aparat Desa, LMDH dan calon anggota dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan PHBM. Menurut Priscolli (1997) dalam Suporahardjo (2005), pada kegiatan partisipasi, masyarakat harus punya suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka serta partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan.

Tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah tahap pembentukan LMDH dan KTH. Tahap ini akan memilih kordinaator dan ketua lembaga yang nantinya bisa menaungi dalam proses keberlanjutan program PHBM yang ada di desa Pait. Tugas lembaga adalah membantu perhutani dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang telah disepakati dalam tahap perencanaan PHBM. Sedangkan KTH berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari LMDH. Untuk membentuk LMDH kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: pemberian undangan, presentase kehadiran, penentuan jumlah anggota, penetapan jumlah anggota, penentuan kordinator LMDH, dan pemilihan kordinator LMDH. Dari kegiatan-kegiatan itu kita akan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat.

Pemberian undangan bertujuan untuk pemberitahuan kepada calon anggota akan adanya rapat kordinasi. Dengan adanya undangan semua pihak mengetahui acara apa yang akan dilakukan oleh pihak perhutani. Selain itu diharapkan dengan adanya pemberian undangan masyarakat bisa berbondong-bondong untuk hadir. Undangan pembentukan LMDH dan KTH ini akan diserahkan kepada calon anggota, yang di sebar langsung oleh pihak Perhutani. Pihak perhutani selaku pihak yang paling dominan harus bisa mengkordinasi dalam proses pemberian undangan agar tidak salah dalam pemberian. Sesuai pada realita yang ada dilapang proses pemberian undangan kepada calon anggota cukup bagus. Semua undangan bisa sampai kepada seluruh calon anggota yang dituju.

Untuk kegiatan presentase kehadiran bertujuan untuk melihat seberapa besar antusiasnya calon anggota yang akan hadir dalaam sebuah rapat. Karena presentase kehadiran ini akan berdampak pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan kenyataan dilapang bahwa tinggakat presentase kehadiran calon anggota cukup tinggi, karena dalam pemberian undangan terdapat rentetan acara yang berkelanjutan untuk proses pemberian lahan kepada calon anggota. Inilah yang diharapkan semua pihak karena dengan tingkat presentase kehadiran yang tinggi maka semua keputusan akan dirundingkan dengan seksama sehingga tidak ada hal-hal yang ditanyakan lagi setelah acara selesai.

Kegiatan Penentuan jumlah anggota sebenarnya sudah dirundingkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak perhutani dengan aparat desa setempat. Tujuan perundingan ini akan menentukan jumlah anggota yang akan terlibat dalam PHBM. Namun setelah dilakukan tidak semerta-merta langsung ditetapkan, pihak perhutani akan melihat betul kondisi orang-orang tersebut dilapang. Agar nantinya lahan yang akan dibagi bisa tepat sasaran. Penentuan jumlah anggota akan disampaikan langsung pada saat rapat kordinasi. Sesuai kondisi dilapang, calon anggota ini tidak tahu bagaimana cara-cara penentuan jumlah anggota dan pentapan jumlah anggota, yang mereka tahu bahwa yang telah di undang oleh perhutani untuk kordinasi dan masyarakat berusaha untuk datang.

Tujuan dibentuknya kordinator adalah mempermudah dalam proses penyaluran informasi baik itu dari aparat perhutani kemasyarakat ataupun sebaliknya dari masyarakat ke pihak perhutani. LMDH ini berfungsi sebagai jembatan untuk saling tukar informasi. Hasil surve yang telah dilakukan maka didapat hasil tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pembentukan LMDH.

Tabel 22: Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pembentukan LMDH

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
Pemberian undangan	41	41	0	100
Persentase kehadiran	41	41	0	100
Penentuan jumlah anggota	41	3	38	7
Penetapan jumlah anggota	41	41	0	100
Penentuan kordinator LMDH	41	41	0	100
Pemilihan kordinator LMDH	41	41	0	100

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari tabel diatas kita bisa melihat banyaknya orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan pembentukan LMDH. Sebanyak 41 responden yang kita ambil dalam penelitian ini, untuk kegiatan pemberian undangan persentase kehadiran, penetapan jumlah anggota, penentuan kordinator dan pemilihan kordinator responden mereka selalu terlibat dalam semua kegiatan atau tingkat keterlibatannya sebesar 100%, sedangkan untuk kegiatan penentuan jumlah anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan hanya 3 anggota. Untuk kegiatan penentuan anggota ini yang berperan penuh adalah dari pihak perhutani, sehingga

tingkat keterlibatan anggota cukup sedikit. Dari situ bisa kita persentasekan dari 6 kegiatan di atas sekitar 38 orang atau sekitar 92,5% anggota PHBM mengikuti 5 kegiatan, 3 orang atau sekitar 7,5% mengikuti 6 kegiatan,. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pembentukan LMDH lebih dari 90% anggota sudah terlibat penuh dalam tahap pembentukan LMDH.

Untuk tingkat keterlibatan adalah setiap anggota yang mengikuti masing-masing kegiatan nantinya akan memperoleh nilai 1. Kemudian hasil nilai dari tiap-tiap kegiatan akan di jumlah sesuai dengan tingkat keikutsertaan, selanjutnya keterlibatan anggota pada masing-masing kegiatan akan dijumlah.. Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa anggota yang terlibat 5 kegiatan sebanyak 38 orang. Sedangkan yang terlibat 6 kegiatan sebanyak 3 orang. Jadi bisa kita lihat, jumlah seluruh kegiatan yang diikuti seluruh respondent adalah 190 dari anggota yang mengikuti lima kegiatan dan anggota yang mengikuti enam kegiatan. Hasil yang didapatkan di atas merupakan hasil dari penjumlahan setiap anggota yang terlibat di setiap kegiatan dalam program PHBM.

Dengan adanya LMDH dan KTH ini masyarakat anggota PHBM maupun aparat terkait, berharap LMDH dan KTH ini bisa membantu dalam menjaga keamanan dan menstabilkan apa yang telah menjadi proplem hutan selama ini, sehingga program PHBM bisa terus berlanjut. LMDH dan KTH nantinya bisa menampung keluhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat yang bisa memajukan program PHBM. Karena masyarakat masih menganggap bahwa aspirasi-aspirasi anggota PHBM masih belum terwadahi secara maksimal oleh perhutani, sehingga pembentukan LMDH maupun KTH sangat diperlukan. Dan yang terpenting dari itu semua harapan calon anggota adalah dengan adanya LMDH dan KTH bisa mensejahterakan rakyat kecil yang merupakan anggota dari PHBM dan hutan kita tetap lestari.

Dalam proses keberlangsungan PHBM tingkat partisipasi masyarakat bisa berbeda dengan tipologi partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat bisa berdampak baik dalam tipologi partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi yang baik juga belum tentu bisa membawa dampak baik dalam tipologi partisipasi. Di bawah ini bisa kita lihat tipologi masyarakat desa Pait dalam partisipasi pembentukan LMDH.

Tabel 23: Tipologi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan LMDH

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Jumlah orang</b>	<b>(%)</b>
Partisipasi fungsional	38	92,5
Partisipasi interaktif	2	5
Mandiri	1	2,5

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat desa Pait yang tergolong partisipasi fungsional sebanyak 92,5%. Untuk yang tergolong partisipasi insentif hanya 5%, dan sisanya masuk dalam tingkat partisipasi mandiri 2,5%. Pada tahap pembentukan KTH ini masyarakat desa Pait secara keseluruhan tergolong kedalam tipologi masyarakat partisipasi Fungsional. Masyarakat tidak termasuk ke dalam partisipasi pasif atau manipulative karena masyarakat tidak hanya mendapat informasi sepihak yang hanya menguntungkan secara sepihak, namun anggota sudah berpartisipasi banyak dalam setiap kegiatan. Hal ini dikarenakan masyarakat pada tahap pembentukan LMDH ini sudah bisa berkumpul dan bisa membentuk sebuah lembaga yang nantinya bisa membantu dalam proses keberlangsungan PHBM. LMDH sebagai media dari anggota beraspirasi untuk mengusulkan apa yang terbaik untuk program PHBM. Masyarakat yang merupakan calon anggota juga berpartisipasi untuk penentuan siapa calon siapa yang pantas untuk menjadi kordinator LMDH. Disini masyarakat menyalurkan apa yang nantinya terbaik untuk program PHBM dan LMDH. Bahkan jika tidak menemui jalan tengah dalam penentuan kordinator melalui pemilihan, masyarakat calon anggota ini dilibatkan dalam pemilihan kordinator. Dengan masyarakat yang tergolong fungsional nantinya masyarakat bisa berubah tingkat partisipasinya. Sehingga lama-kelamaan masyarakat bisa tergolong kedalam tipologi partisipasi mandiri.

Pada data diatas 1 anggota termasuk kedalam partisipasi mandiri karena anggota tersebut sudah mempunyai inisiatif untuk memperbaharui sistem yang ada seperti bagaimana sistem penentuan dan pemilihan kordinator dan kegiatan kegiatan lainnya. 2 anggota dikatakan partisipasi insentif karena masing-masing anggota sudah melakukan kegiatan dalam setiap kegiatan yang ada, selain itu anggota juga sudah melakukan dialog-dialog tentang berjalanya kegiatan dalam

tahap pembentukan LMDH. 38 anggota dikatakan kedalam partisipasi fungsional karena masing-masing anggota sudah tahu hak dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan di dalam keberhasilan program PHBM.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan yang kedua adalah pembuatan kontrak kerja. Kontrak kerja dibuat agar semua pihak tahu tentang tata aturan apa saja yang akan diterapkan dan sanksi apa yang akan didapat oleh pihak yang melanggar kesepakatan bersama di dalam program PHBM. Dalam pembuatan kontrak kerja nantinya semua elemen supaya terlibat, agar tidak ada kesenjangan ataupun salah penafsiran diantara Perhutani, lembaga LMDH, dan anggota (pesanggem) tentang pembuatan kontrak kerja hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Dalam realita pelaksanaan di lapang proses pembuatan kontrak kerja ini yang paling dominan adalah dari pihak perhutani. Anggota dari PHBM tidak ada satupun yang terlibat dalam pembuatan kontrak kerja. Hal ini langsung diklarifikasi dengan adanya tanggapan dari salah satu pihak Perhutani yang mengatakan bahwa memang betul yang membuat draf pembuatan kontrak kerja adalah pihak Perhutani. Sedangkan masyarakat tidak tahu apa-apa dalam proses pembuatan kontrak kerja. Dominannya pihak perhutani ini dikarenakan banyak anggota maupun pihak LMDH yang belum bisa memanfaatkan teknologi (penggunaan computer untuk penulisan naskah kontrak kerja) dan kebanyakan anggota adalah lulusan SD sehingga mereka masih merasa kesulitan dalam proses pembuatan kontrak kerja. Sehingga proses pembuatan kontrak kerja dilimpahkan langsung kepada pihak Perhutani sebagai badan usaha yang mengelola hutan yang ada di desa Pait. Sebenarnya bukan pihak perhutani yang dominan melainkan karena sumberdaya manusia yang kurang bisa mengikuti perkembangan jamanlah yang mengakibatkan pihak perhutani yang selama ini seolah-olah paling dominan dalam pembuatan undangan.

Selanjutnya kontrak kerja ini dipelajari oleh pihak perhutani, pihak lembaga, dan pihak anggota. Tujuan dipelajarinya kontrak kerja ini adalah tidak ada kekeliruan dalam proses penulisan naskah kontrak kerja sehingga dalam proses perjalanan program PHBM tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Selain itu perlunya kontrak kerja dipelajari adalah agar semua pihak

mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada yang paling menonjol dalam proses pembuatan kontrak kerja program PHBM yang ada di desa Pait.

Sesuai kenyataan yang ada di lapang pada tahap kegiatan kontrak kerja dipelajari ternyata tak ada pihak LMDH maupun anggota PHBM yang mempelajari kontrak kerja. Mereka sudah mempercayakan penuh kepada pihak Perhutani untuk kegiatan ini. Masyarakat tidak mau terlalu pusing dan ribet dengan urusan-urusan administrasi yang diberikan oleh pihak Perhutani. Anggota hanya ingin langsung bisa mengolah lahan dan bercocok tanam, sehingga bisa memanen dengan cepat hasil dari bercocok tanam di lahan perhutani. Inilah yang mengakibatkan pada kegiatan ini tingkat partisipasi anggota sangatlah rendah. Padahal semua anggota wajib mengikuti semua kegiatan agar tidak terjadi kejanggala ketika dalam proses pelaksanaan nantinya.

Pada kegiatan sosialisasi kontrak kerja semua elemen mulai dari pihak Perhutani, Aparat desa, lembaga, dan anggota semuanya diharapkan bisa hadir. Tujuan diadakan sosialisasi adalah semua pihak mengetahui peraturan-peraturan apa saja yang ada di program PHBM. Apa yang menjadi tanggung jawab pihak aparat dan apa yang menjadi tanggung jawab lembaga dan anggota harus tersampaikan dengan sejelas-jelasnya. Sehingga mereka bisa bekerja sama dan bekerja sesuai dengan *job-disnya* masing-masing. Dengan adanya sosialisasi kontrak kerja ini semua pihak boleh mengeluarkan aspirasinya yang penting bisa membuat program PHBM bisa lebih baik dan tidak ada unsur niatan buruk pada program ini.

Sungguh cukup luar biasa pada tahap sosialisasi kontrak kerja ini seluruh anggota bisa hadir. Rupanya anggota sadar tentang apa pentingnya dari kegiatan sosialisasi ini. Didalam kegiatan ini masyarakat juga aktif dalam bertanya mengenai apa yang tidak mereka mengerti tentang kontrak kerja dan apa yang harus dia lakukan dengan adanya kontrak kerja ini. Hal inilah yang diperlukan oleh semua pihak agar semua bisa paham dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawab sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan.

Setelah kontrak kerja dipelajari dan disosialisasikan kepada semua pihak tidak selanjutnya adalah memperbaiki jika ada kesalahan. Apa yang menjadi rekomendasi pada tahap sosialisasi bisa dimasukkan kedalam kontrak kerja yang baru. Perbaikan-perbaikan ini nantinya yang akan dijadikan sebagai kontrak kerja yang baru dan benar. Untuk perbaikan naskah akan dikembalikan kepada pihak Perhutani sebagai lembaga yang menaungi program PHBM. Pada kegiatan penanda tanganan kontrak kerja anggota mempercayakan kepada pihak aparat desa dan lembaga. Sistem kepercayaan inilah yang dibangun masyarakat untuk keberlangsungan PHBM. Pihak Perhutani dan lembaga akan mendapatkan masing masing satu lembar kontrak kerja yang nantinya bisa digunakan sebagai arsip ataupun sebagai bukti tuntutan jika ada salah satu pihak yang melanggar dari kontrak kerja.

Pada tahap implementasi sesuai dengan harapan semua pihak. Semuanya bisa terlibat baik itu kegiatan yang secara program kerja maupun kegiatan yang sifatnya spontanitas aja. Semua itu bertujuan untuk kebaikan dari program PHBM. Sesuai dengan hasil dilapang bahwa tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat pada kegiatan ini cukup tinggi, hampir seluruh masyarakat ikut dalam implementasi. Kegiatan terakhir pada tahapan ini adalah evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menjadikan program kerja jauh lebih baik. Kegiatan evaluasi ini kebanyakan melalui pendekatan-pendekatan personal. Banyak aparat yang terjun langsung ke masyarakat untuk member masukan-masukan kepada anggota yang sekiranya belum melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam kontrak kerja.

Dalam tahap perencanaan ini semua anggota baik dari Perhutani, aparat Desa, LMDH dan calon anggota berhak mengutarakan apa yang mereka inginkan yang tujuannya untuk kepentingan keberhasilan PHBM. Disitulah ajang untuk anggota dalam menyalurkan aspirasinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan PHBM bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak baik aparat, dinas maupun anggota. Maka dari itu, ketika pada tahap perencanaan yang datang hanya beberapa orang niscaya pogram PHBM bisa berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian di lapang tabel 24 dapat dilihat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan program PHMB.

Tabel 24: Hasil Analisa pada Tahap Kontrak Kerja

Intensitas keikutsertaan	Jumlah responden	Jumlah terlibat	Jumlah tidak terlibat	% keterlibatan
pembuatan kontrak kerja	41	1	40	3
kontrak kerja dipelajari	41	1	40	3
kontrak kerja disosialisasikan	41	41	0	100
kontrak kerja ditandatangani	41	11	30	27
kontrak kerja di implementasi	41	41	0	100
kontrak kerja di evaluas	41	3	41	7

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan mulai dari kegiatan pembuatan kontrak kerja, mempelajari kontrak kerja, pensosialisasian kontrak kerja, penanda tanganan kontrak kerja, implementasi kontrak kerja dan evaluasi kontrak kerja masih cukup rendah. Tabel di atas menyebutkan dari 41 responden, yang mengikuti pembuatan kontrak kerja dan kontrak kerja dipelajari hanya 1 orang, pada kegiatan sosialisasi kontrak kerja dan kegiatan implementasi 41 orang terlibat, dan untuk penanda tanganan kontrak kerja hanya beberapa orang dari anggota yang dianggap memiliki peran penting yaitu 11 anggota. Dari hasil diatas bisa peneliti akumulasikan bahwa anggota phbm yang terlibat lebih dari empat kegiatan pada tahap ini hanyalah tiga orang atau sekitar 7,5% dan yang paling banyak masyarakat hanya mengikuti dua kegiatan yaitu pensosialisasian kontrak kerja dan implementasi kontrak kerja yaitu sekitar 28 orang atau sekitar 68%, sisanya 11 orang atau 27% mengikuti tiga kegiatan. Untuk kegiatan seperti penanda tanganan kontrak kerja diwakili oleh lembaga, aparat desa, kelompok tani hutan, sedangkan yang lainnya merupakan tanggung jawab pihak perum perhutani seperti pembuatan kontrak kerja, pembelajaran kontrak kerja, penanda tanganan maupun evaluasi. Begitu dominannya peran dari pihak perhutani inilah berdampak pada minimnya tingkat partisipasi masyarakat pada tahap kontrak kerja.

Tingkat keterlibatan yang diperoleh dari setiap kegiatan pada tahap kontrak kerja sangat bervariasi. Dari hasil wawancara tingkat partisipasi yang di dapat untuk anggota yang mengikuti dua kegiatan jumlah yang didapat total yang diperoleh sebanyak 56, jumlah yang didapat dari anggota yang mengikuti tiga

kegiatan 30, anggota yang mengikuti lima kegiatan memiliki jumlah nilai 10, dan jumlah nilai yang didapat dari mengikuti enam kegiatan adalah 6. Hasil diatas merupakan hasil penjumlahan dari banyaknya anggota yang mengikuti kegiatan dari masing-masing tahapan yang ada dalam tahap pembuatan kontrak kerja.

Tingkat tipologi partisipasi masyarakat pada tahap kontrak kerja penentuan jenis tanaman merupakan penilaian dari hasil wawancara yang diakumulasikan dalam bentuk persentase. Dibawah ini dapat kita lihat seberapa besar tipologi tingkat partisipasi masyarakat pada tahap kontrak kerja penentuan jenis tanaman.

Tabel 25: Tipologi Partisipasi Masyarakat pada Tahap Kontrak Kerja

Tingkat Partisipasi	Jumlah orang	(%)
Partisipasi pasif atau manipulative	0	0
Partisipasi informative	10	24,5
Partisipasi konsultatif	29	70,5
Partisipasi interaktif	1	2,5
Mandiri	1	2,5

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tipologi masyarakat yang tergolong dalam partisipasi informative sebanyak 24,5%, petani yang tergolong partisipasi konsultatif sebesar 70,5%, petani partisipasi interaktif sebanyak 2,5%, dan yang tergolong petani mandiri sebesar 2,5%. Sebanyak 24,5 % petani dikatakan petani informative dikarenakan masyarakat ini merasa tidak mempunyai kesempatan dalam setiap pengambilan keputusan dalam tahan kontrak kerja penentuan jenis tanaman. Sebanyak 70,5% petani tergolong kedalam partisipasi konsultaatif.

Dapat kita lihat diatas bahwa 10 anggota termasuk kedaam partisipasi informative karena 10 anggota tersebut hanya diberitahu oleh petugas apa yang harus dan apa yang nantinya dikerjakan. Anggota tidak memiliki peran penting dalam hal ini. Para anggota tergolong kedalam partisipasi konsultatif karena didalam tahap kontrak kerja ini masyarakat sudah terlibat dalam proses dikusi dan saling bertukar informasi. Namun masyarakat ini belum bisa mempengaruhi dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. 1 anggota yang tergolong kedalam partisipasi Interaktif adalah anggota yang sudah melakukan kegiatan dan dilanjutkan dialog dengan petugas. 1 anggota termasuk kedalam partisipasi

mandiri ini adalah pihak LMDH dan pihak perhutani. Pihak LMDH terlibat dalam semua kegiatan dalam PHBM namun mereka masih minim dalam ide-ide kreatif untuk dikembangkan dalam PHBM, sedangkan pihak perhutani sebagai partisipasi mandiri karena beliau merupakan oknum yang selalu terlibat dalam setiap kegiatan dan mempunyai inisiatif dan ide-ide sendiri yang bisa memajukan program PHBM. Dari situ dapat disimpulkan sementara bahwa tipologi masyarakat desa Pait yang paling dominan pada tahap kontak kerja termasuk kedalam partisipasi konsultatif.

*Wonten tahap niki kulo nanging tumut kaleh kegiatan, geh meniko pas tahap sosialisasi kaleh implementasi. Rencang-rencang geh katah sing mboten tumut, rencang-rencang nganggep mboten prlu ngoten niku sing penting angsal bagian engkang saget didamel nyukupi sandang pangan.*

*Pada tahap ini saya hanya mengikuti dua kegiatan yaitu pada tahap sosialisasi dan implementasi. Teman-teman juga banyak yang tidak ikut. Teman-menganggap itu tidak perlu, yang mereka butuhkan, dapat lahan yang nantinya bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka.*

Dapat kita lihat bahwa dalam tahap perencanaan ini masih bersifat *top-down* di mana keputusan masih bersumber dari atas. Disini yang memegang penuh dalam setiap keputusan adalah pihak perum perhutani. Masyarakat hanyalah sebagai obyek yang tujuannya untuk membantu kelancaran semua program yang telah dirancang ataupun dibuat oleh pihak perum perhutani. Walaupun petani sendiri juga menikmati hasil dari lahan hutan namun tidak seperti yang mereka harapkan. Apakah dalam tahap perencanaan ini akan berdampak pada tahap-tahap selanjutnya? Mari kita lihat pada tahap-tahap pelaksanaan program PHBM di situ kita akan mengetahui berpengaruh apa tidak hasil dari kegiatan perencanaan ke tahap pelaksanaan.

### 5.3.2 Partisipasi Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ada empat kegiatan utama dimana seluruh peserta PHBM seharusnya berpartisipasi secara aktif. Kegiatan-kegiatan tersebut mulai dari aktifitas pembagian andil dan pemasangan patok batas, kegiatan persiapan lahan, pelaksanaan dan penentuan sistem bagi hasil. Tahap pembagian andil dan pemasangan patok batas terdiri dari kegiatan penentuan lokasi andil, penentuan luas andil, pengukuran andil, pengundian andil, penentuan tempat patok, jenis patok yang digunakan, pemasangan patok. Tahap persiapan terdiri dari pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan gubuk kerja, pembuatan teras gundulan, pembuatan jarak tanam, pemasangan anjir, pembuatan lobang tanam, pembuatan plang. Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan menanam sesuai jarak tanam, menyulam, mendangir tanaman pokok, merawat tanaman sela, mencegah pencurian kayu, mencegah pencurian daun, dan mencegah kebakaran hutan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan terakhir adalah Sistem bagi hasil yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penentuan tanggal survei lokasi dengan pihak terkait, melakukan survei lokasi, pengukuran volume hasil panen, proses negosiasi bagi hasil, penetapan sistem bagi hasil, pemberian bagi hasil, dan evaluasi sistem bagi hasil.

Pada tahap pertama pembagian andil dan pemasangan patok batas yang terdiri dari kegiatan-kegiatan penentuan lokasi andil, penentuan luas andil, pengukuran andil, pengundian andil, penentuan tempat patok, jenis patok yang digunakan, pemasangan patok. Proses penentuan lokasi adil akan dikelola langsung oleh pihak perhutani. Pihak perhutani akan bekerja sama dengan Perhutani pusat, bahwa ada lahan yang harus meleakukan pembaharuan-pembaharuan atau ada waktu masa tebang tanaman pokok. Setelah itu Pihak perhutani akan mendapat sebuah SK dari pihak perhutani unit II Jatim atau sering disebut perhutani provinsi agar membuka lahan baru untuk dijadikan lokasi PHBM. Untuk itu RPH harus melakukan penebang pohon dilokasi yang akan dijadikan tempat baru program PHBM. Perhutani nantinya harus menebang seluruh pohon yang ada dilokasi tersebut mulai yang kecil sampai yang terbesar. Pihak perhutani yang ada di RPH nantinya sebagai pelaksana dari apa yang menjadi sebuah keputusan dari pimpinan yang ada di atasnya. Setelah itu pihak perhutani akan menghubungi semua pihak untuk kegiatan pengukuran andil.

Pada kasus penentuan andil di KTH Desa Pait, lahan milik perhutani yang mempunyai pohon yang sudah besar dan siap ditebang diukur jumlah pohon dan volumenya dalam satu petak misal petak 26A. Dari pengukuran tersebut, diketahui luasan lahan serta jumlah kayu. Selanjutnya petugas perhutani didampingi lembaga dan KTH melakukan pengukuran diameter dari setiap pohon yang ada di lahan petak 26A. Hasil dari pengukuran akan di laporkan ke pihak Unit II Jatim. Setelah mendapat SK untuk penebangan maka akan dilakukan penebangan. Lahan yang telah dilakukan penebangan inilah yang akan dijadikan lokasi untuk program-program PHBM. Kegiatan ini disebut sebagai penentuan lokasi andil dimana penentuan andil ini tidak selalu ada tiap tahun.

Pengukuran andil ini, akan dilakukan secara bersama-sama mulai dari pihak perhutani sampai anggota. Tujuan dilakukan pengukuran adil secara bersama agar seluruh anggota tahu berapa luasan lahan dalam satu area tersebut yang akan dibagi kepada masyarakat anggota. Sehingga dengan adanya pengukuran ini semua tahu setiap orang akan mendapatkan bagian seberapa luas. Diharapkan dalam proses pengukuran andil ini tidak ada kecurangan agar semua anggota memiliki luasan yang sama. Disnilah perlunya tingkat partisipasi dari masyarakat yang cukup tinggi agar tidak ada penyelewengan-penyelewengan yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya hanyalah mencari keuntungan semata.

Dalam proses di lapang pada kegiatan pengukuran andil ini semua terlibat mulai dari Perhutani, Aparat dan anggota. Hal inilah yang diharapkan oleh semua pihak, karena dengan tingkat partisipasi yang tinggi dari anggota maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti perbedaan luas lahan dan dominasi aparat bisa terhidari. Setelah melakukan pengukuran di lapang pihak perhutani akan menghitung berapa luasan lahan sebenarnya. Sehingga akan ketemu berapa luasan sebenarnya yang harus didapat oleh masing-masing anggota, karena sering ada perbedaan luas lahan antara yang ada didalam surat perjanjian dengan keadaan yang ada di lapang. Apabila tahapan-tahapan dalam pengukuran adil selesai barulah diadakan pembagian atau pengundian. Dari proses pengukuran dilapang setiap anggota nantinya akan mendapat sekitar  $0,25m^3$  atau sekitar  $2500m^2$ .

Besarnya luasan ini sudah disesuaikan dengan jumlah anggota yang akan mendapat bagian dan sesuai dengan kondisi yang ada dilapang.

Pada kegiatan ketiga yaitu pengukuran andil, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh seluruh pihak, semua anggota wajib datang pada lokasi yang dijadikan program PHBM. Pihak Perhutani didampingi oleh anggota dan Lembaga akan mengukur berapa luasan area dari atas sampai kebawah dengan menggunakan meteran panjang. Disitulah akan ketemu luasan lahan yang sebenarnya, selanjutnya lahan tersebut akan diukur lagi sesuai dengan jumlah anggota yang terdaftar. Disini fungsi dari anggota adalah selain untuk membantu dalam proses pengukuran juga berfungsi sebagai pemantau agar tidak terjadi kecurangan dalam pengukuran.

Kegiatan ke-empat pada tahapan ini adalah pengundian lokasi andil. Pengundian andil ini nantinya dilakukan sekaligus bersamaan dengan kegiatan pengukuran. Tujuan dilakukan pengundian ini agar tidak ada pihak yang bisa semenang-menang meminta lokasi sesuai dengan keinginan pribadi. Karena ini adalah hutan bersama dan anggota memiliki tujuan yang sama. Supaya tidak terjadi kesalah pahama diantara anggota dan pihak Perhutani maka dilakukanlah sistem pengundian. Sistem pengundiannya harus secara transparan semua pihak harus tahu dalam pelaksanaan pengundian tidak boleh hanya satu atau dua orang saja yang tahu pada proses pembagian andil. Di sini semua pihak harus bekerja sama untuk menegakkan keadilan.

Sesuai dengan kenyataan yang ada dilapang pada tahap pembagian andil ini sebetulnya tingkat partisipasi dari masyarakat cukuplah tinggi. Namun masih saja ada dari pihak aparat yang memanfaatkan derajatnya untuk memiliki luasan lahan yang lebih besar dari yang lain. Seolah-olah orang ini adalah orang yang berperan penting dalam adanya pembukaan lahan untuk program PHBM. Tetapi anggota tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengkritik atau menegur aparat. Mereka justru menganggap hal itu adalah hal yang biasa dan wajar karena anggota menganggap orang-orang itu sudah berperan penting dalam proses pembukaan lahan. Selain itu anggota juga merasa takut semisal mereka melakukan protes kepada pihak aparat mereka tidak akan mendapat bagian lahan. Hal itulah yang menyebabkan mereka menganggap hal itu adalah biasa.

Pada kegiatan ini masyarakat dikumpulkan di suatu tempat di lahan. Pihak perhutani menyiapkan buku ataupun kertas yang nantinya ditulis letak-letak tempat, selanjutnya masing-masing anggota disuruh mengambil satu dari kertas tersebut. Kertas yang diambil itu nantinya merupakan lokasi lahan yang akan diolah oleh masing-masing anggota PHBM. Cara inilah yang bisa dianggap layak dan tidak ada rekayasa dari pihak Perhutani.

Kegiatan penentuan patok batas akan diletakkan pada batas-batas lahan yang telah diukur sesuai pembagian. Fungsi penentuan patok batas ini adalah anggota tahu bahwa luasan lahan yang dimilikinya sudah ada patokan-patokan batasnya. Semua elemen yang terlibat ini harus bisa ikut andil dalam penentuan lokasi penentuan patok agar nantinya jika ada salah satu dari aparat maupun dari anggota ingi berbuat curang, semua bisa langsung mengingatkan bahwa ketentuan-ketentuan awal adalah seperti ini. Dalam pelaksanaannya penentuan patok batas ini sudah sesuai dengan apa yang terancang dalam konseptual. Namun yang masih berperan dalam penentuan tempat patok ini masih pihak perhutani dan lembaga yang menaungi PHBM yaitu LMDH.

Kegiatan ke-enam yaitu penentuan jenis patok apa yang akan digunakan. Saran dari pihak terkait untuk jenis patok ini terbuat dari bambu yang telah ditandai missal: bambu dicat merah, tujuan patok terbuat dari bambu adalah bambu ini mudah didapat disekitar lokasi selain itu dengan menggunakan bambu akan mempermudah dalam proses pembawaan kelokasi, patok ini tidak dibutuhkan terlalu lama hanya digunakan sementara, sekedar berfungsi sebagai batas antar lokasi satu dengan yang lainnya. Nantinya pihak individu yang mengelola bisa mengganti sendiri patok dengan jenis tanaman-tanaman kayu atau yang lainnya.

Kegiatan dilapang menyebutkan bahwa dalam penentuan jenis patok ini yang paling berperan adalah pihak perhutani. Masyarakat tidak tahu jenis patok apa yang akan digunakan di lahan. Mereka menganggap bahwa dengan sudah mendapatkan andil dan tahu berapa luasa lahan yang didapat semua kegiatan udah selesai, untuk penentuan jenis patok terserah dari perhutani yang penting bisa digunakan sebagai tanda bahwa ini lahan yang saya miliki. Jika tidak ada patok yang disarankan ataupun dibuatkan oleh pihak perhutani, anggota akan

menentukan sendiri jenis patok untuk digunakan sebagai tanda batas wilayah dengan pemilik lahan yang ada disebelahnya.

Kegiatan ke-tujuh adalah pemasangan patok. Pemasangan patok bertujuan sebagai tanda pembatas pada setiap luasan lahan masing-masing anggota. Pemasangan patok akan dilakukan oleh semua pihak tanpa terkecuali. Di sini pihak Perhutani akan memberi arahan dimana letak pemasangan patok batas. Di dalam pemasangan patok batas ini pihak perhutani atau dari anggota diharapkan tidak ada yang paling dominan, sehingga akan menimbulkan kontroversi atau kesalah pahaman antar anggota. Untuk itu jiwa kepemimpinan dan sistem kepercayaan harus teletak kepada seorang pemimpin ataupun pada aparat agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan.

Kegiatan pemasangan patok ini semua warga mulai dari aparat terkait sama anggota sudah berpartisipasi walaupun masih ada beberapa anggota yang tidak mengikuti. Ketidak hadirannya beberapa anggota ini kebanyakan karena adanya kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Secara keseluruhan bisa dikatakan baik dan membanggakan. Walaupun yang masih dominan pihak perhutani dalam pemasangan patok, tetapi tujuan dari pihak perhutani ini adalah membimbing anggota-anggota yang di mana mereka masih sulit untuk memahami sebuah aturan yang ditetapkan. Dengan terjunnya pihak perhutani kelapang dan selalu memberi arahan nantinya bisa memotivasi para anggota tanpa harus menunggu perintah dari pihak perhutani. Untuk itu pihak perhutani melakukan sebuah metode dengan melakukan praktek langsung ke lapang.

Kegiatan penentuan patok, jenis patok, dan pemasangan patok ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah diukur sesuai ukuran yang sesuai dengan pembagian ditentukan tempat patok untuk pembatas dari lahan masing-masing anggota. Jenis patok adalah bambu yang bawahnya sudah dibuat runcing, bambu dibuat runcing dengan tujuan agar mudah dalam proses penempatan. Setelah patok siap barulah patok-patok ini di pasang sebagai batas dari lahan masing-masing anggota.

Dari data di bawah ini dapat kita lihat persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembagian andil dan pemasangan patok batas. Sehingga kita bisa melihat apakah masyarakat antusias terhadap kegiatan yang dilakukan ataupun tidak.

Tabel 26: Hasil Analisa Tahap Pembagian Andil dan Pemasangan Patok Batas

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
Penentuan Lokasi Andil	41	41	0	100
Penentuan Luas Andil	41	41	0	100
Pengukuran Andil	41	41	0	100
Pengundian Andil	41	41	0	100
Penentuan Tempat Patok	41	3	38	7
Jenis Patok Yang Digunakan	41	1	40	3
Pemasangan Patok	41	41	0	100

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari tabel data di atas bisa kita lihat dalam tahap penentuan lokasi andil, penentuan luas andil, pengukuran andil, pengundian andil dan pemasangan patok. 41 responden terlibat dalam kegiatan di atas. Sedangkan pada kegiatan penentuan tempat patok yang terlibat sebanyak 3 anggota, dan yang ikut dalam penentuan jenis patok yang digunakan hanya 1 anggota yang belu juga sebagai aparat perhutani. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan sementara pada tahap pembagian andil dan pemasangan patok batas ini anggota yang melakukan lima kegiatan sebanyak 33 anggota atau sekitar 80% dari responden. Untuk yang mengikuti empat kegiatan sebanyak 5 anggota atau sekitar 12,5%. Sedangkan pada sisanya mengikuti enam kegiatan dan tujuh kegiatan masing-masing 2 anggota dan 1 anggota atau sekitar 5% dan 2,5%. Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap penentuan andil dan pemasangan patok batas masuk kedalam kriteria baik. Karena lebih dari 50% anggota sudah mengikuti lima kegiatan dalam satu tahap dan setiap kegiatan anggota terlibat aktif. Kegiatan yang banyak diikuti oleh anggota PHBM ini antara lain penentuan lokasi andil, penentuan luas andil, pengukuran andil, pengundian andil, dan pemasangan patok batas.

Setelah kita mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan. Selanjutnya kita bisa mengetahui tipologi partisipasi masyarakat pada tahap penentuan andil dan pemasangan patok batas. Tipologi ini, akan menentukan karakter dari setiap anggota untuk terlibat langsung kedalam PHBM. Dari tipologi ini kita akan mengetahui bagaimana keterlibatan dan keaktifan anggota dalam kegiatan-kegiatan penentuan andil dan pemasangan patok batas. Di bawah ini dapat kita lihat tabel tipologi partisipasi masyarakat dalam tahap penentuan andil dan pemasangan patok batas.

Tabel 27: Tipologi Partisipasi Masyarakat pada Tahap Penentuan Andil dan Pemasangan patok batas

Tingkat Partisipasi	Jumlah orang	(%)
Partisipasi insentif	30	72,5
Partisipasi fungsional	8	20
Partisipasi interaktif	2	5
Mandiri	1	2,5

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa tipologi masyarakat dalam tahap ini berbeda-beda. Sebanyak 72,5% anggota PHBM termasuk kedalam partisipasi insentif, 20% termasuk dalam partisipasi fungsional, 5% masuk dalam partisipasi interaktif, dan 2,5% termasuk dalam partisipasi mandiri. Masyarakat yang tergolong kedalam partisipasi intensif ini mereka hanya meminta masukan dan berkonsultasi. Setelah mereka melakukan hal tersebut selanjutnya melakukan-kegiatan-kegiatan pada tahap penentuan andil dan pemasangan patok batas yang tujuannya agar mereka mendapat lahan sesuai dengan harapan. Namun masyarakat tidak memiliki hak penuh untuk memiliki, ketika nantinya lahan yang mereka olah diambil oleh pihak perhutani mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pihak perhutani tidak akan salah-olah mengambil lahan milik warga, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk mengambil hak menggarap lahan dari petani penggarap. Untuk yang tergolong kedalam partisipasi fungsional mereka merupakan orang-orang yang sudah bisa mementingkan kebersamaan untuk keberlanjutan program PHBM. Untuk partisipasi interaktif ini kebanyakan pihak ketua LMDH karena mereka selalu terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang ada dalam PHBM. Untuk petani yang dikatakan partisipasi mandiri ini

adalah pihak perhutani yang memiliki andil dan harus memiliki ide-ide kreatif untuk disalurkan kepada anggota yang lain.

Dari angka diatas dapat kita tarik kesimpulan awal bahwa pada tahap pembagian andil dan pemasangan patok batas ini anggota PHBM tergolong dalam kategori partisipasi insentif karena hampir 72,5% dari jumlah anggota mengikuti 4 kegiatan dalam pembagian andil dan pemasangan patok batas. Maksud dari partisipasi insentif itu sendiri adalah Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumberdaya misalnya jasa dan tenaga kerja. Disini masyarakat kebanyakan tidak mengikuti kegiatan pada kegiatan penentuan tempat patok dan jenis patok yang digunakan.

Kegiatan kegiatan seperti pemasangan patok atau pembagian andil bertujuan untuk mempermudah petugas dalam proses pengawasan dan proses-proses selanjutnya seperti penanama, pemasangan anjir. Selain itu dengan adanya plang ataupun patok batas anggota PHBM akan mengetahui seberapa besar lahan yang digarap sehingga dikemudian hari tidak ada saling kecemburuan sosial tentang luasan lahan yang telah dibagi sebelumnya. Walaupun paara anggota tidak ikut memasang patok batas biasanya mereka mematoki lahannya sendiri dengan menanam pohon pisang ataupun pohon-pohonan lainnya.

Tahapan ke-dua dalam pelaksanaan program PHBM adalah persiapan lahan. Persiapan lahan ini sendiri merupakan tahapan yang harus dilakukan. Karena dalam tahap ini merupakan akses sebelum kita mengijak kedalam tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada tujuh kegiatan dalam tahap persiapan lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: pembuatan jalan pemriksaan, pembuatan gubuk kerja, pembuatan teras gundulan, pembuatan jarak tanam, pemasangan anjir, pembuatan lobang tanam, dan pembuatan plang tanaman.



*Gambar 3 : Proses Pembuatan Jalan*

Pembuatan jalan pemeriksaan bertujuan agar anggota PHBM maupun aparat bisa mudah dalam menuju lokasi anggota yang telah diundi. Proses pembuatan jalan pemeriksaan dilakukan oleh seluruh anggota dan pihak terkait. Perhutani nanti harus member saran kepada anggota berapa luasan jalan yang akan dibuat. Pembuatan jalan pemeriksaan ini sebagaimana mestinya kendaraan roda dua bisa menuju lokasi. Hal ini akan mempermudah pihak perhutani dalam melakukan patroli untuk menjaga keamanan hutan. Dalam proses pembuatan jalan pemeriksaan juga dilakukan bersamaan proses pembuatan gubuk kerja. Jadi di dalam pelaksanaannya kegiatan ini berurutan setelah proses pembuatan jalan selesai maka seluruh anggota akan bergotong royong membuat gubuk kerja yang nantinya bisa dijadikan tempat singgah oleh anggota yang merasa capek disaat perjalanan menuju atau pulang dari lokasi lahan masing-masing anggota.

Sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh pihak Perhutani, bahwa dalam kegiatan pembuatan jalan pemeriksaan ini seluruh anggota dan pihak terkait bisa terlibat. Keterlibatan inilah yang nantinya saling mengakrapkan satu sama lain, sehingga tidak akan timbul kecemburuan dalam kegiatan ini, karena ketidakhadiran salah satu anggota dalam pembuatan jalan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan seluruh anggota saling bekerja sama (gugur gunung) membuat jalan pemeriksaan sampai batas lokasi terjauh yang telah disepakati dalam kontrak kerja.



*Gambar 4: Proses Pembuatan Gundulan*

Pembuatan teras gundulan ini maksudnya adalah bahwa masyarakat yang telah menjadi anggota wajib membersihkan lahaanya masing-masing sebelum dilakukan penanaman. Pembuatan gundulan ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses penanaman pada tahap pelaksanaan. Di dalam proses pembuatan gundulan ini nantinya setiap lokasi masing-masing anggota tidak boleh ada tanaman apapun sebelum ada perintah dari pihak perhutani. Karena jika ada tanaman yang lain nantinya akan menghambat proses pertumbuhan tanaman yang telah disarankan perhutani. Pihak perhutani harus bisa memprediksi kapan harus melakukan pembuatan teras gundulan ini. Sehingga jarak dengan musim penghujan tidak terlalu jauh. Karena musim hujan sudah memasuki musim tanam.

Kegiatan pembuatan teras dilapang sudah sesuai dengan kesepatan dan sudah sesuai dengan harapan dari perhutani. Dalam proses pembuatan gundulan ini ternyata membutuhkan waktu yang agak lama. Hal itu dikarenakan banyaknya sisa-sisa ranting pohon dan juga batang bawah pohon yang baru ditebang. Sehingga anggota PHBM yang memiliki lahan tersebut harus bekerja keras membersihkan ranting-ranting tersebut. Namun di setiap tahapan perhutani harus bertidak dengan tegas, karena kegiatan dilapang kadang kala banyak anggota yang menyepelkan kegiatan-kegiatan sehingga apa yang sudah menjadi target dan kesepakatan menjadi tertunda sehingga menyebabkan proses kedepannya juga akan menjadi terlambat lagi.



*Gambar 5: Pembuatan Jarak Tanam*

Pembuatan jarak tanam di sini adalah bahwa setiap tanaman satu dengan tanaman yang lain harus memiliki jarak yang telah disosialisasikan dalam tahap kontrak kerja. Jarak tanam yang digunakan oleh pihak perhutani sesuai SK yang dimandatkan  $3 \times 3 \text{m}^2$  atau  $5 \times 5 \text{m}^2$  dan setiap 5 larian tanaman utama di tambah satu tanaman sela yaitu tanaman horti. Untuk tanaman lain nantinya diserahkan kepada masing-masing anggota yang tujuannya bisa menambah nilai ekonomi. Jarak tanam di buat agar ketika pohon tumbuh besar tidak saling menaungi satu sama lain. Sehingga proses pertumbuhannya bisa normal dan serentak sesuai dengan harapan.

Kenyataan dilapang pada kegiatan pembuatan jarak tanam ini cukuplah susah. Peserta harus membuat jarak tanam seperti melingkari gunung supaya tanaman bisa terlihat bagus selain kelihatan bagus proses ini bertujuan agar setiap lereng yang ada di hutan ada pohon penyangga, sehingga ketika pada musim hujan yang akan datang lahan tidak longsor karena curah hujan yang tinggi. Disinilah perlunya bimbingan dari pihak perhutani agar proses pembuatan jarak tanam sesuai dengan harapan. Jarak tanaman antara lahan milik anggota satu dengan anggota lainnya harus membentuk seperti lingkaran. Hal inilah yang selama ini menjadi kendala anggota PHBM dalam penentuan jarak tanam. Karena dalam proses ini tidak semua anggota bisa melakukan proses pembuatan jarak tanam dengan model melingkari gunung.



*Gambar 6: Sosialisasi Pemasangan Ajir*

Tahap selanjutnya yaitu pemasangan ajir, gambar diatas merupakan proses sosialisasi bagaimana cara membuat ataupun meletakkan ajir yang benar. Ajir- ajir ini nantinya ini digunakan sebagai tegakan agar tanaman utama yang ditanam tidak mudah roboh ketika terkena hujan dan angin. Sama seperti penentuan jarak tanam ajir ini nantinya dibuat melingkari sebuah gunung ataupun bukit yang tujuannya agar tanaman utama ketika tumbuh bisa terlihat bagus dan yang paling penting mudah dalam proses penilaian yang dilakukan pihak dari propinsi apakah sudah sesuai dengan anjuran atau belum. ajir-ajir ini nantinya harus diberi tanda, agar dari jarak yang agak jauh bisa kelihatan.

Ternyata sesuai dengan kenyataan hasil yang ada di lapang, proses pemasangan ajir bisa dikatakan sangat baik. Karena seluruh anggota bisa turut serta dalam kegiatan ini, walaupun masih banyak anggota yang belum bisa mandiri dalam pelaksanaan pemasangan ajir, dan masih perlu adanya bimbingan dari pihak Perhutani. Ajir yang digunakan terbuat dari bambu yang telah dibelah menjadi ukuran kecil. Ajir-ajir ini bagian atas akan dicat agar ketika dipasang dilahan bisa terlihat apakah lahan tersebut sudah di pasangi ajir atau belum. Pemasangan ajir dengan metode melingkari gunung ini sungguh sangat sulit dilakukan apabila tidak ada bantuan dari orang-orang yang sudah paham betul dengan metode ini.



*Gambar 7: Pembuatan Lobang Tanam*

Kegiatan selanjutnya adalah pembuatan lobang tanam, pembuatan lubang tanam bertujuan untuk meletakkan tanaman-tanaman tahunan yang telah disepakati dalam kontrak kerja dan lubang tanam ini dibuat di dalam ajir. Besar dan dalamnya lobang tanam ini disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman yang disediakan oleh pihak perhutani. Gambar di atas merupakan contoh dari lubang tanam yang sudah dibuat oleh anggota. Untuk mempermudah dalam proses dilapangan Peran dari perhutani dalam kegiatan ini adalah mengorganisir seluruh anggota agar melakukan pembuatan lobang tanam agar kegiatan pembuatan lobang selesai tepat waktu.

Dilapang antosias masyarakat untuk kegiatan pembuatan lobang tanam ini secara keseluruhan bisa dikatakan baik. Walaupun masih ada beberapa anggota yang lambat untuk membuat lobang tanam. Pembuatan lobang tanam ini menurut banyak anggota jaraknya masih terlalu jauh sehingga anggota harus bekerja dua kali untuk pembuatan lobang tanam. Anggota berharap kepada pihak perhutani untuk pembuatan lobang tanam bersamaan dengan waktu penanaman. Hal itu bertujuan untuk menghemat biaya pengeluaran anggota. Karena kalau jarak pembuatan lubang dan penanaman terlalu jauh maka lubang-lubang tanam yang semula telah dibuat lama-kelamaan akan kemasuk tanah lagi. Ketika akan melakukan penanaman anggota harus membuat lobang lagi. Hal inilah yang merugikan anggota.

Kegiatan yang terakhir adalah pemasangan plang, pemasangan plang ini bertujuan agar setiap melihat plang, anggota PHBM tahu bahwa tanaman apa



Tabel 28: Hasil Analisa Tingkat Partisipasi Pada Tahap Persiapan Lahan

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
pembuatan jalan pemeriksaan	41	41	0	100
pembuatan gubuk kerja	41	41	0	100
pembuatan teras gundulan	41	41	0	100
pembuatan jarak tanam	41	41	0	100
pemasangan anjir	41	41	0	100
pembuatan lobang tanam	41	41	0	100
pembuatan plang	41	1	40	3

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa dalam kegiatan pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan gubuk kerja, pembuatan teras gundulan, pembuatan jarak tanam, pemasangan ajir, dan pembuatan lobang tanam seluruh responden terlibat langsung disetiap kegiatan. Sedangkan pada kegiatan pemasangan plang yang terlibat hanya pihak perhutani yang juga pengelola hutan juga. Dari data tersebut bisa kita lihat secara keseluruhan pada tahap persiapan lahan sekitar 97,5% atau 40 dari responden telah mengikuti 6 kegiatan, mereka mengikuti kegiatan pembuatan jalan pemeriksaan, pembuatan gubuk kerja, pembuatan teras gundula, pembuatan jarak tanam, pemasangan anjir, dan pembuatan lobang tanam. Para anggota PHBM pada tahap persiapan lahan ini hanya tidak mengikuti satu kegiatan yaitu pada saat pembuatan plang. Pembuatan plang ini biasanya dilakukan oleh mandor yang mengurus lahan tersebut. Dan dalam satu hamparan luas biasanya hanya dikasih satu plang sebagai tanda. Sehingga dalam kegiatan pemasangan plang ini hanya pihak perhutani dan masyarakat tidak terlibat. Maka dari itu pada tahap persiapan lahan ini yang mengikuti kegiatan penuh hanya 1 orang atau 2,5% dari total jumlah responden yang diambil.

Setelah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada tahap persiapan lahan, barulah kita bisa mengetahui tipologi partisipasi masyarakat melalui alasan yang diberikan oleh responden kenapa mereka mengikuti kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan lahan pada kegiatan wawancara mendalam. Tipologi dari masing-masing anggota bisa berbeda-beda setiap individu anggota. Dari hasil wawancara

mendalam yang ada dilapang dapat kita lihat tipologi-tipologi masyarakat pada tahap persiapan lahan.

Tabel 29: Tipologi Masyarakat pada tahap persiapan lahan

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Jumlah orang</b>	<b>(%)</b>
Partisipasi interaktif	40	97,5
Mandiri	1	2,5

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 97,5% tergolong kedalam partisipasi interaktif dan 2,5% tergolong kedalam partisipasi mandiri. Anggota PHBM tergolong kedalam partisipasi interaktif ini karena masyarakat terlibat langsung dalam proses konsultasi, mendapat jasa, dan sudah mengambil peran dalam pengambilan keputusan mulai dari kegiatan pembuatanjalan, pembuatan gubuk, pembuatan teras gundulan, pembuatan jarak tanam, pemasangan anjir dan pembuatan lobang tanam. Dengan hasil sebesar 97,5% pada tahap persiapan lahan ini maka partisipasi masyarakat anggota PHBM desa Pait tergolong kedalam partisipasi Interaktif. Dari hasil tersebut bisa berdampak baik pada tahapan selanjutnya. Masyarakat mengetahui betul dalam proses tahap pelaksanaan mereka memang dibutuhkan dan mereka juga merasa butuh sehingga tingkat partisipasi masyarakat bisa tergolong sangat tinggi. Dengan tingkat antusias masyarakat yang sangat tinggi dalam tahap persiapan lahan tidak menutup kemungkinan nantinya akan berdampak baik juga pada tahap pelaksanaan. Meskipun dalam pelaksanaan masih ada kekurangan, namun kekurangan dalam partisipasi itu bisa ditutupin dengan kelebihan-kelebihan lain. Mungkin ini merupakan keberhasilan dari kerja keras petugas, lembaga, dan KTH sehingga dalam tahap persiapan lahan bisa mencapai angka yang sangat baik yaitu mencapai 97,5%.

Tahap ke-tiga yaitu tahap pelaksanaan program PHBM yang ada di desa Pait. Pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari tujuh kegiatan antara lain: menanam sesuai jarak tanam, menyulam tanaman yang mati, mendangir tanaman pokok, merawat tanaman sela, mencegah pencurian kayu, dan mencegah kebakaran hutan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan program PHBM. Disini nanti dapat kita ketahui apa saja yang menjadikan kegiatan kegiatan diatas menjadi penting untuk dilakukan.

Tujuan dilakukan penanaman sesuai dengan jarak tanam adalah untuk mempermudah dalam proses perawatan. Dengan menanam sesuai jarak tanam nantinya anggota bisa memanfaatkan tanaman sela dengan berbagai macam jenis tanaman lain. Sesuai dengan penentuan jarak tanam yang telah disepakati, para anggota menanam dengan ukuran jarak  $3 \times 3 \text{ m}^2$  atau  $5 \times 5 \text{ m}^2$ . Penanaman sesuai jarak tanam bertujuan agar pada masa pertumbuhan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Begitupun dengan jenis tanaman yang akan ditanam harus sesuai dengan kontrak kerja contoh tanaman pokok suren, tanaman pinggir mahuni, dan tanaman sela adalah tanaman horti. Dalam proses penanaman ini biasanya ada perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini. Para perempuan ini bertujuan untuk membantu istri menanam tanaman yang disarankan pihak perhutani agar cepat selesai. Namun di sini kita tidak menghitung seberapa besar tingkat partisipasi perempuan secara keseluruhan dalam program PHBM.

Proses penanaman yang terjadi dilapang petani sudah menanam jenis tanaman yang telah disepakati. Penanaman tanaman tepi dan tanaman pokok memiliki jarak yang berbeda. Tanaman tepi jaraknya terlalu dekat dibandingkan dengan tanaman pokok. Pada tahapan penanaman ini tingkat partisipasi masyarakat cukuplah bagus. Walaupun masih banyak anggota yang perlu dorongan motivasi dari pihak perhutani, akhir-akhirnya anggota juga mau menanam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menyulam tanaman bertujuan anggar tanaman yang mati cepat diganti dengan tanaman yang baru sehingga pertumbuhan tanaman bisa seretak. kegiatan penyulaman ini nantinya dilakukan setiap ada tanaman yang mati, anggota tidak diperkenankan untuk menunda-nunda kegiatan penyulaman, meskipun yang mati cuma sedikit anggota harus dengan segera meminta bibit baru kepada perhutani untuk dilakukan penyulaman. Petugas perhutani harus sering melihat ke lokasi karena pada penyulaman sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anggota tidak melakukan penanaman meski sudah dikasih bibit untuk penyulaman.

Pada proses pelaksanaan kegiatan menyulam seluruh anggota ikut berpartisipasi. Namun di dalam pelaksanaan masyarakat tidak menerapkan apa yang disarankan perhutani untuk segera menyulam. Para anggota melakukan kegiatan menyulam apabila dilahannya sudah banyak tanaman yang sudah mati. Anggota melakukan itu dikarenakan untuk menghemat waktu dan tenaga . ketika petani harus menyulam ketika ada tanaman yang mati dengan waktu yang tidak bersamaan maka akan berakibat pada pembengkakan biaya tenaga kerja.

Kegiatan pembumbunan bertujuan agar tanaman tidak roboh ketika diterjang angin. Kegiatan pembubunan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti bisa mengenai akar dari tanaman yang bisa menyebabkan tanaman itu mati. Maka dari itu proses pembubunan ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengenai akar dari tanaman. Pembumbunan ini nantinya dilakukan oleh pemilik masing-masing wilayah, untuk proses pengerjaannya kapan juga dikembalikan lagi kepada pihak yang memiliki lahan tersebut.

Kegeiatan-kegiatan pembubunan di lapang sudah dilaksanakan oleh pemilik lahan tanpa harus menunggu perintah dari pihak perhutani. Kegiatan pembubunan ini biasanya dilakukan dengan pembumbunan tanaman sela. Sehingga inilah yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembubunan sangatlah tinggi. pemilik lahan juga melakukan pembumbunan dengan hati-hati agar tidak mengenai akar tanaman. Karena jika tidak hati-hati dan mengenai akar tanaman maka tanaman akan mati dan pemilik lahan harus melakukan kegiatan penyulaman.

Merawat tanaman sela bertujuan agar tanaman sela ini tetap tumbuh dengan baik karena tanaman sela ini kebanyakan tanaman buah-buahan dan rumput gajah sehingga targetnya tanaman sela bisa tumbuh dengan baik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain tanaman sela jenis buah-buahan, pihak perhutani juga menyarankan untuk menanam tanaman hijauan yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Walaupun pemilik lahan tidak mempunyai ternak tapi nanti bisa dijual kepada anggota lain yang memiliki pakan ternak.

Perawatan tanaman sela ini sangat-sangat diperhatikan oleh masing-masing pemilik lahan. Tanaman sela ini nantinya yang bisa membantu untuk memperoleh penghasilan tambahan. Tanaman sela yang dipinggir-pinggir biasanya ditanami buah pisang, tanaman sela ditengah buah-buahan sama rumput gajah. Tanaman-tanaman itulah yang bisa dimanfaatkan untuk menambah nilai ekonomi masyarakat. Dengan adanya tanaman sela yang menghasilkan maka tingkat partisipasi anggota dilahan PHBM sangat tinggi. sehingga bisa membantu dalam keberhasilan PHBM.

Selanjutnya untuk mencegah pencurian kayu, kebakaran hutan, dan pencurian daun ini bertujuan agar hutan yang ada sekitar kita tetap tumbuh dengan indah sesuai dengan harapan semua anggota sehingga keamanan dan ketentraman tetap terjaga dan yang utama adalah udara yang ada di sekitar kita menjadi sejuk. Ketiga kegiatan tersebut harus dilakukan kapanpun karena jika tidak dilakukan maka program PHBM yang semula telah terancang dan terlaksana dengan baik akan menjadi sia-sia akibat dari kelakuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mencegah pencurian kayu, mencegah kebakaran hutan, dan pencurian daun.

Di dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan sangat baik, ketika ada yang melakukan tindakan pencurian maka orang yang mengetahui segera melapor ke pihak Perhutani dan selanjutnya pihak perhutani akan menindak lanjuti proses laporan dari anggota. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka seemua anggota wajib berkordinasi untuk saling mengingatkan dan mengawasi lahannya masing-masing, supaya ketiga kegiatan di atas tidak terjadi. Apabila terjadi pencurian atau kebakaran, maka yang akan ditanya terlebih dahulu adalah pemilik dari lahan tersebut. Untuk sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran biasanya langsung dikenakan sanksi sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati secara bersama. Di dalam pengawasan ketiga kegiatan tersebut anggota PHBM tidak harus setiap hari datang ke lahan untuk menunggu setiap hari. Di sini yang terpenting anggota bisa saling bekerjasama untuk mengawasi sehingga keamana bisa terjaga.

Dalam setiap kegiatan dalam program PHBM tidak luput dari partisipasi masyarakat anggota PHBM. Dari beberapa kegiatan tersebut kita bisa mengukur tingkat partisipasi dengan menggunakan kusioner hasil wawancara di lapang. Pada tahap pelaksanaan ini diperoleh hasil atau data jawaban dari responden yang ada di lapang. Di bawa ini merupakan hasil perolehan data di lapang.

Tabel 30: Hasil Analisa Tahap Pelaksanaan Program PHBM

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
Menanam Sesuai Jarak Tanam	41	41	0	100
Menyulam	41	41	0	100
Mendangir Tanaman Pokok	41	41	0	100
Merawat Tanaman Sela	41	41	0	100
Mencegah Pencurian Kayu	41	41	0	100
Mencegah Pencurian Daun	41	41	0	100
Mencegah Kebakaran Hutan	41	41	0	100

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa seluruh anggota PHBM terlibat dalam semua kegiatan dalam tahap pelaksanaan. Dengan capaian hasil 100% ini merupakan capaian yang maksimal. Seluruh anggota mengikuti kegiatan pelaksanaan mulai dari penanaman, penyulaman, pembubunan, perawatan, pencegah terjadinya pencurian kayu dan daun, serta mencegah kebakaran hutan. Mereka sudah mengetahui kapan mereka harus menanam, menyulam dan menjaga keamanan. Inilah yang merupakan dambaan atau keinginan dari semua pihak di setiap tahapan semua masyarakat bisa terlibat penuh. Namun di manapun ada kesempatan di sana pasti ada kekurangannya.

Pada tahap kali ini, bisa kita lihat bahwa total tingkat keterlibatan yang diperoleh dari hasil penjumlahan ke ikut sertaan anggota di setiap kegiatan adalah 287. Hal ini membuktikan bahwa pada setiap kegiatan yang ada pada tahap ini, masyarakat selalu terlibat. Dengan hasil jumlah yang maksimal pada tahap ini, diharapkan bisa menular pada tahapan-tahapan selanjutnya. Karena dengan tingkat partisipasi yang maksimal maka, suatu program akan bisa berhasil.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat ini diharapkan bisa terus berlanjut. Karena dalam proses pemulihan hutan seperti ini perlu intensitas dan kerjasama antara masyarakat dan pihak terkait yang saling menguntungkan. Ketika masyarakat anggota PHBM mulai lengah dalam kegiatan pengawasa maka aparat maupun pihak LMDh wajib memberi tahu. Karena apabila program ini berhasil maka tidak menutup kemungkinan anggota juga akan menikmati hasil dari program PHBM.

Setelah mengetahui tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam tahap pelaksanaan. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana tipologi partisipasi masyarakat di dalam tahap pelaksanaan. Tipologi partisipasi ini berdasarkan hasil analisa atas tiap responden yang telah diwawancarai secara mendalam tentang partisipasi anggota di dalam tahap pelaksanaan. Di bawah ini adalah tabel tipologi partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan

Tabel 31: Tipologi Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan

Tingkat Partisipasi	Jumlah orang	(%)
Partisipasi interaktif	40	97,5
Mandiri	1	2,5

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari tabel diatas dapat kita lihat sebanyak 97,5% tergolong kedalam partisipasi interaktif dan 2,5% tergolong kedalam partisipasi mandiri. Anggota PHBM dikatakan sebagai tipologi partisipasi interaktif karena mereka sudah berperan dalam proses setiap kegiatan mulai dari penanaman sampai pada pencegahan pencurian ataupun kebakaran. Selain itu anggota juga berperan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan pihak perhutani seperti kapan mereka harus menanam dan kapan harus menyulam. Anggota PHBM ini juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembunanan, perawatan tanaman sela, mencegah kebakara, mencegah pencurian tanpa harus disuru oleh pihak perhutani. Oleh sebab itulah peneliti menggolongkan tipologi masyarakat pada tahap pelaksanaan ini masuk kedalam tipologi partisipasi interaktif.

Tahap ke-empat dalam perencanaan adalah tahap sistem bagi hasil. Tahap sistem bagi hasil akan dilakukan secara kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak perhutani dan anggota PHBM. Kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam tahap sistem bagi hasil antara lain: penentuan tanggal survei lokasi dengan pihak terkait, survei lokasi, pengukuran volume hasil panen, negosiasi hasil panen,

penetapan bagi hasil, pemberian bagi hasil, dan evaluasi system bagi hasil. Kegiatan ini, yang bisa mengukur tingkat partisipasi anggota PHBM.

Tujuan dilakukan penetapan tanggal surve adalah agar kedua belah pihak menyempatkan hadir dilokasi masing-masing pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan. Selain itu dengan penentuan tanggal menghindari kesalah pahaman antara aparat dan anggota ketika mereka tidak sama-sama tahu dalam proses penentuan presentase bagi hasil. Sosialisasi-sosialisasi tentang sistem bagi hasil juga harus sering dilakukan pihak perhutani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk proses penentuan tanggal surve pada tanaman pokok anggota PHBM masih belum berpartisipasi secara maksimal, namun pada penentuan tanggal surve bagi hasil tanaman sela, tingkat partisipasi anggota sangat tinggi.

Setelah pada hari yang telah ditentukan maka akan dilakukan pengukuran volume hasil panen dan negosiasi penetapan sistem bagi hasil di setiap lokasi masing-masing anggota PHBM. Kepada seluruh anggota PHBM diharapkan hadir di lokasi untuk mengetahui besaran hasil yang akan diperoleh masing-masing anggota dan berapa besar yang akan dibagi kepada pihak perhutani. Kegiatan negosiasi-negosiasi yang berujung pada kesepakatan inilah yang diharapkan oleh seluruh pihak baik dari perhutani dan anggota. Sehingga ketika penetapan hasil panen, seluruh anggota tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak. Dalam pelaksanaan dilapang pada kegiatan pengukuran volume dan negosiasi tanaman pokok tingkat partisipasi masyarakat sangat kurang. Disini yang berperan banyak hanyalah pihak perhutani sedangkan dari anggota diwakili oleh pihak LMDH hal ini yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat pada pengukuran volume hasil tanaman pokok cukup sedikit. Namun pada kegiatan pengukuran volume hasil tanaman sela tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi. karena yang selama ini mereka bisa harapkan adalah hasil dari tanaman sela, sehingga mereka harus terlibat langsung dalam setiap tahapan ini.

Ketika volume bagi hasil telah disepakati, selanjutnya anggota berkewajiban menyerahkan bagi hasil ke pihak perhutani. Besarnya jumlah bagi hasil harus sesuai dengan proses negosiasi yang telah disepakati ke dua belah pihak. Jumlah dari bagi hasil yang diberikan kepada perhutani masih akan dibagi lagi kepada pihak-pihak yang terkait mulai dari perhutani, lembaga, aparat desa,

kepolisian dan koramil. Apabila semua sudah dilaksanakan baru dilakukan proses evaluasi. Sesuai dengan harapan hampir seluruh anggota dan aparat dalam kenyataan di lapang semua pihak bisa bekerja sama dengan baik untuk menyerahkan bagi hasil tanaman utama. Sehingga dalam penyerahan bagi hasil tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang disebabkan karena perbedaan banyak sedikitnya hasil yang harus di berikan masing-masing anggota kepada pihak perhutani. Namun untuk bagi hasil tanaman utama masyarakat belum paham betul tentang mekanismenya.

Dari kegiatan-kegiatan diatas dapat diketahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem bagi hasil. Pada kegiatan bagi hasil ini ada dua kategori, pertama bagi hasil tanaman pokok berupa tanaman tahunan yang telah disepakati pada tahap kontrak kerja dan yang ke-dua bagi hasil tanaman sela yang di tanami tanaman buah-buahan atau rumput gajah yang merupakan tanaman sela dari tanaman pokok. Di bawah ini dapat kita lihat tabel tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem bagi hasil tanaman pokok:

Tabel 32: Hasil Analisa Sistem Bagi Hasil Tanaman Pokok

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
Penentuan tanggal surve lokasi dengan pihak terkait	41	3	38	3
Melakukan surve lokasi	41	3	38	3
Pengukuran volume hasil panen	41	3	38	3
Proses negosiasi bagi hasil	41	3	38	3
Penetapan sistem bagi hasil	41	41	0	3
Pemberian bagi hasil	41	3	38	3
Evaluasi sistem bagi hasil	41	1	40	3

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dapat kita lihat bahwa tabel diatas pada kegiatan penentuan tanggal surve, melakukan surve, pengukuran volume hasil, proses negosiasi, pemberian negosiasi, dan evaluasi hanya 3 responden yang terlibat. Anggota yang ikut penuh hanya pada kegiatan penetapan bagi hasil. Karena didalam segala penetapan bagi hasil pada tanaman pokok yang paling dominan adalah dari pihak perhutani, namun tidak menutup kemungkinan perhutani sudah berkordinasi dengan pihak

lembaga untuk memberitahu segala apa yang terjadi dalam proses penetapan bagi hasil tanaman pokok. Dari situ bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada tahap bagi hasil tanaman pokok cukup rendah. Dari 41 responden yang kita ambil yang mengikuti lebih dari 2 kegiatan hanya 3 orang saja. Sedangkan sisanya hanya mengikuti satu kegiatan saja dan itupun pada waktu penetapan bagi hasil. Dari tabel sekitar 92,5 % sekitar 38 orang hanya mengikuti 1 kegiatan. Ini sungguh ironis padahal dalam tahap-tahap pelaksanaan sebelumnya seluruh warga terlibat dalam semua kegiatan. Inilah yang selama ini menjadi pertanyaan besar seluruh anggota, karena dalam sistem bagi hasil tanaman pokok masyarakat tidak terlibat langsung dan tidak transparan. Apakah karena itu lahan milik perhutani sehingga masyarakat tidak dilibatkan. Padahal pada kontrak kerja telah disepakati akan ada pembagian yang jelas pada hasil tanaman pokok.

Dari hal itu peneliti mencari tahu alasan mengapa selama ini masyarakat belum terlibat dalam sistem bagi hasil tanaman pokok. Menurut salah satu petugas perhutani, pada tahap pembagian hasil tanaman pokok ini memang yang sangat berperan adalah pihak perhutani. Hal itu diutarakan karena dalam PHBM untuk tanaman pokok yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah perhutani. Namun pihak perhutani sebetulnya juga sudah menghitung tingkat bagi hasil. Berapa besar untuk perhutani, lembaga, anggota (pesanggem) ataupun pemda. Tetapi anggota masih belum banyak yang tahu tentang surat perjanjian yang ada, karena surat perjanjian berada di pihak LMDH.

PHBM di desa Pait ini masih berjalan sekitar 12 tahun sedangkan tanaman pokok yang sudah memasuki masa tebang itu tanaman jauh sebelum PHBM dibentuk sehingga masyarakat belum tahu betul tentang mekanisme bagi hasil sehingga untuk mempermudah itu pihak perhutani berkordinasi dengan lembaga dan nantinya lembaga yang akan mengasih tahu ke anggota. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat tidak terlibat dalam sistem penentuan bagi hasil tanaman pokok. Namun setelah tanaman itu ditebang dan akan ditanami lagi, barulah semua pihak akan dilibatkan kembali pada proses penentuan bagi hasil dari tanaman pokok supaya dikemudian hari proses pembagian hasil ini bisa jelas dan transparan kepada seluruh anggota.

Selanjutnya kita akan mengetahui seberapa besar tipologi partisipasi masyarakat dalam proses bagi hasil. Di bawah ini merupakan hasil dari tipologi partisipasi masyarakat anggota PHBM pada tahap bagi hasil tanaman pokok.

Tabel 33: Tipologi partisipasi pada Tahap Bagi Hasil Tanaman Pokok

Tingkat Partisipasi	Jumlah Orang	(%)
Partisipasi pasif atau manipulative	38	92,5
Partisipasi interaktif	2	5
Mandiri	1	2,5

Sumber: Data Primer, Diolah 2013

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa tipologi masyarakat pada tahap bagi hasil tanaman pokok sebesar 92,5% tergolong kedalam partisipasi pasif atau manipulative, 5% masuk kedalam partisipasi interaktif dan 2,5% masuk kedalam partisipasi mandiri. Seluruh anggota di dalam tahap ini masuk kedalam partisipasi pasif karena mereka tidak terlibat sama sekali dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Hal ini mengacu pada apa yang telah dijelaskan oleh salah satu pihak perhutani di atas. Untuk anggota yang tergolong kedalam partisipasi interaktif ini adalah pihak KTH dan LMDH. Karena didalam setiap kegiatan memang kadang waktu keputusan harus diambil pihak perhutani sendiri. Anggota yang tidak terlibat bukan karena mereka tidak berkompeten namun hal-hal yang sifatnya mendesak memang harus di ambil seendiri oleh perhutani. Mereka masih dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan dan dalam banyak kegiatan untuk program PHBM untuk itu sosialisasi-sosialisasi mutlak di butuhkan untuk menjalin kedekatan emosional dikalangan anggota, perhutani dan lembaga. Karena proses bagi hasil merupakan proses yang sangat vital, jika ada kesalahan maka tidak menutup kemungkinan program ini bisa terhambat di kemudian hari. Maka dari itu dibutuhkan saling pengertian diantara seluruh yang terlibat dalam program PHBM.

Sedangkan di bawah ini dapat kita lihat tabel tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem bagi hasil tanaman sela (horti) atau rumput gajah yang selama ini menjadi harapan dari setoiap anggota ataupun masyarakat yang berada disekitar hutan. Apakah ada perbedaan antara tingkat partisipasi masyarakat pada sistem bagi hasil tanaman pokok dengan sistem bagi hasil tanaman sela atau rumput gajah.

Tabel 34: Hasil Analisa Tingkat Partisipasi Pada Sistem Bagi Hasil tanama Sela

<b>Intensitas keikutsertaan</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Jumlah terlibat</b>	<b>Jumlah tidak terlibat</b>	<b>% keterlibatan</b>
Penentuan tanggal surve lokasi dengan pihak terkait	41	41	0	100
Melakukan surve lokasi	41	41	0	100
Pengukuran volume hasil panen	41	41	0	100
Proses negosiasi bagi hasil	41	41	0	100
Penetapan sistem bagi hasil	41	41	0	100
Pemberian bagi hasil	41	41	0	100
Evaluasi sistem bagi hasil	41	41	0	100

*Sumber: Data Primer, Diolah 2013*

Dari tabel tingkat partisipasi masyarakat pada sistem bagi hasil tanaman sela ini tingkat partisipasi masyarakat cukuplah tinggi. Dengan 100% anggota yang ikut partisipasi ini justru berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap bagi hasil tanaman pokok. Anggota merasa dalam setiap kegiatan bagi hasil tanaman sela mereka harus tahu betul tentang bagaimana mekanisme didalam setiap kegiatan, supaya tidak terjadi kecurangan dalam proses bagi hasil. Dengan adanya tanaman sela ini masyarakat sudah merasa cukup terbantu karena selain tanaman sela yang bisa menghasilkan dia juga bisa memanfaatkan sela-sela tanaman untuk ditanami dengan rumput gajah atau pisang. Setelah ada tanggapan dari pihak Perhutani masyarakat sadar tentang pembagian hasil tanaman pokok. Sehingga masyarakat memaklumi apa yang dilakukan aparat pada tahap bagi hasil tanaman pokok.

Skor yang diperoleh pada tahap bagi hasil tanaman sela berbanding terbalik dengan bagi hasil tanaman pokok. Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa skor yang diperoleh pada tahap ini 287. Skor 287 ini merupakan hasil penjumlahan dari seluruh responden yang terlibat di dalam seluruh kegiatan proses bagi hasil tanaman sela. Hal ini membuktikan bahwa anggota selalu terlibat dalam setiap kegiatan- kegiatan yang ada pada tahap sistem bagi hasil tanaman sela. Dengan hasil skor yang maksima, bisa dikatakan berhasil pada tahap sistem bagi hasil tanaman sela.

Pada tahap pembagian hasil tanaman sela ini memang sudah dirancang sejak tahun 2004. Sehingga masyarakat mengetahui betul untuk sistem pembagian hasil. Untuk tanaman sela jenis buah-buahan petani pesanggem kebanyakan menanam tanaman durian. Pembagian hasil tanaman buah durian juga melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga pada waktu pengukuran volume hasil durian diharapkan pihak pesanggem hadir dalam lokasi. Setiap dari hasil 10 buah durian pihak perhutani mendapat 2,5 buah. Hasil 2,5 buah tadi sudah meliputi hak dari Perhutani, lembaga, dan pemerintah desa. Dalam pembagian hasil ini pihak pesanggem merasa banyak diuntungkan.

Untuk sistem bagi hasil hijauan makanan ternak atau sering disebut HMT setiap 1Ha anggota dikenai biaya sebesar Rp. 150.000. uang sebesar Rp 150.000 ini nantinya dibagi kepada empat pihak yang berwenang. Pihak perhutani sebagai pengelola hutan mendapat Rp 100.000, LMDH mendapat Rp 25.000, Pembinaan Rp 15.000, dan pemda mendapat bagian Rp 10.000. Pembagian hasil usaha pada pihak-pihak terkait di atas dilakukan selambat-lambatnya setelah kompensasi pembayaran masuk ke Perhutani. Untuk proses pembayaran HMT selama ini sudah berjalan sesuai dengan harapan, meski ada yang lambat tapi secara keseluruhan sudah sesuai dengan harapan perhutani.

Selanjutnya kita akan menggali data apakah ada perbedaan tipologi partisipasi anggota pada tahap bagi hasil tanaman pokok dan bagi hasil tanaman sela. Di bawah ini adalah tipologi partisipasi masyarakat pada tahap bagi hasil tanaman sela.

Tabel 35: Tipologi Partisipasi Pada Tahap Bagi Hasil Tanaman Sela

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>Jumlah orang</b>	<b>(%)</b>
Partisipasi interaktif	40	97,5
Mandiri	1	2,5

*Sumber: Data Primer, Diolah 2012*

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa sebanyak 97,5 % anggota tergolong ke dalam partisipasi interaktif dan 2,5% tergolong kedalam partisipasi mandiri. Di dalam tipologi partisipasi bagi hasil tanaman horti ini berbeda ataupun berbanding terbalik dengan tipologi partisipasi pada bagi hasil tanaman pokok. Anggota pada tahap bagi hasil tanaman sela termasuk kedalam partisipasi interaktif karena mereka mempunya peran yang sangat penting mulai dari penentuan tanggal survei masyarakat terlibat langsung, pada kegiatan survei dan pengukuran volume hasil panen masyarakat hadir di dalam lahan masing-masing untuk saling terlibat, proses negosiasi dan sistem bagi hasil masyarakat anggota terlibat dalam pengambilan keputusan yang terbaik agar sama-sama tidak dirugikan. Sehingga pada penyerahan tidak ada yang merasa dirugikan. Setelah itu anggota juga masih dilibatkan kembali dalam proses evaluasi untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang masih perlu perbaikan. Untuk yang tergolong kedalam partisipasi mandiri adalah pihak dari perhutani yang sekaligus anggota juga. Pihak perhutani ini memang dituntut menjadi partisipasi mandiri anggar memberi contoh anggota-anggota yang lain untuk menjadi anggota yang mandiri.

### **5.3.3 Evaluasi Partisipasi dalam PHBM**

Evaluasi program PHBM ini merupakan hasil keseluruhan dari kegiatan-kegiatan pada setiap tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Besarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam PHBM yaitu bekisar antara 1-42. Angka maksimal ini diperoleh dari penjumlahan kegiatan disetiap tahapan-tahapan baik itu tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Dari evaluasi ini kita akan memperoleh data seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat desa Pait secara keseluruhan dalam berjalannya setiap kegiatan program PHBM. Sehingga bisa digunakan untuk membenahi tahapan-tahapan yang tingkat partisipasi anggotanya masih cukup rendah. Di bawah ini dapat kita lihat tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan

Dari hasil rekapitulasi secara keseluruhan dapat kita ketahui bahwa dari 41 responden yang telah kita ambil sebanyak 22 atau sekitar 53,65 % anggota mengikuti kegiatan sebanyak 30, 9 anggota atau sekitar 21,95% mengikuti 31 kegiatan, 7 anggota atau sekitar 16,5% mengikuti 32 kegiatan, 1 anggota atau 2,5% mengikuti 38 kegiatan, 1 anggota 2,5% mengikuti 41 kegiatan, dan 1 anggota 2,5% mengikuti 45 kegiatan. Dari situ bisa dilihat bahwa sebenarnya masyarakat sangat antusias dalam setiap kegiatan. Hampir setiap tahapan dalam proses PHBM anggota minimal mengikuti empat sampai lima kegiatan. Meskipun dalam tahap perencanaan dan sistem bagi hasil tingkat partisipasi masyarakat masih cukup kurang namun pada tahap pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat cukuplah tinggi. Belum kita telusuri apakah keberhasilan itu merupakan keberhasilan dari aparat atau LMDH kita belum tahu. Namun yang pastinya pada tahap-tahap diatas memiliki nilai yang positif bagi masyarakat anggota PHBM. Sedangkan untuk tipologi masyarakat secara keseluruhan bisa digolongkan kedalam partisipasi fungsional. Hal ini terbukti dengan mereka sudah membentuk sebuah kelompok yang bisa menjangkau wadah mereka untuk beraktualisasi didalam lahan PHBM. Dan yang terakhir adalah bisa membantu seluruh anggota untuk menjadikan dirinya semakin mandiri.

Kurangnya tingkat partisipasi petani dalam program PHBM ini diduga berkaitan dengan tidak berjalan lancarnya kegiatan pembinaan yang dilakukan perhutani, perhutani juga masih terlalu dominan dalam setiap kegiatan bisa menjadi dampak buruk dalam setiap tahapan. Tidak adanya penyuluhan secara teratur menyebabkan petani peserta program PHBM kurang mendapatkan masukan dan informasi yang cukup mengenai peranan dan manfaat berbagai kegiatan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan program PHBM. Kurangnya pengetahuan mengenai jenis dan manfaat tanaman juga menyebabkan petani kurang memahami pentingnya arti peranan tanaman kehutanan, sehingga petani kurang termotivasi untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang bersama-sama. Hal seperti yang dijelaskan ini harus bisa menjadi bahan evaluasi yang mendasar bagi seluruh pihak-pihak yang terkait didalam program PHBM yang ada di desa Pait.

Apa yang sekarang menjadi kurang dari berjalannya program PHBM bisa menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan tingkat partisipasi masyarakat lebih besar lagi dan yang sekarang sudah baik dalam setiap tahapan bisa dipertahankan. Sesuai dengan tujuan PHBM selain menjaga hutan bersama masyarakat, hutan ini bisa dijadikan masyarakat untuk bercocok tanam dan menambah penghasilan masing-masing anggota. Jangan sampai program PHBM ini menguntungkan salah satu pihak baik itu Perhutani atau anggota saja. Sehingga apa yang menjadi harapan bisa tercapai sebagaimana mestinya anggota untung perhutani juga untung.

Pola-pola seperti pendekatan personal harus sering dilakukan oleh aparat perhutani. Pihak perhutani harus sering datang dan memberi pencerahan-pengarahan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan ditahap perencanaan dan pelaksanaan dengan baik. Motivasi-motivasi harus juga sering dilakukan, pihak perhutani tidak bisa melakukan dengan cara memarahi atau tidakan lain yang kurang baik. Karena dengan memarahi anggota justru tidak akan menjadikan program PHBM berjalan sesuai harapan. Mereka justru akan tertekan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan perhutani, yang justru menjadi kerugian bagi pihak perhutani karena menyebabkan tingkat partisipasi dari anggota semakin mengendor.

Pelibatan-pelibatan anggota dalam berbagai kegiatan dan pengambilan keputusan juga perlu dilakukan. kegiatan itulah yang bisa menjadikan anggota merasa dianggap. Dengan mereka merasa diaanggap akan lebih meningkatkan tingkat partisipasi anggota, sehingga bisa membantu dalam keberlanjutan program PHBM. Transparansi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan sistem bagi hasil mutlak diperlukan. Jangan sampai salah satu pihak mencari kesempatan dalam kesempatan. Pola-pola pelibatan seperti inilah yang harus segera di kerjakan oleh pihak perhutani selaku pengelola hutan agar program PHBM bisa jauh lebih baik dan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi lagi.

#### 5.4 Keterlibatan LMDH dan KTH dalam PHBM

Dari kegiatan kegiatan yang telah dilakukan di tahap perencanaan dan pelaksanaan. Diperlukan keterlibatan pihak LMDH dan pihak KTH. Keterlibatan dalam setiap tahapan nantinya bisa membantu dalam keberhasilan program PHBM. Perlu kita ketahui bahwa tanpa adanya keterlibatan LMDH dan KTH perhutani akan merasa kesulitan untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang harus disampaikan karena jumlah anggota PHBM yang sangat banyak. Maka dari itu dibentuklah LMDH dan KTH yang tujuannya bisa membantu petugas perhutani dalam menyampaikan segala hal ke anggota, baik yang sifatnya formal dan non-formal. Di sini pihak LMDH dan KTH dituntut agar seluruh informasi penting bisa sampai kepada anggota. Selain itu pihak LMDH dan KTH juga harus bisa mengkordinir seluruh anggotanya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program PHBM.

Dari hasil wawancara yang didapatkan dilapang, banyak berabagai fariasi jawaban dari rensponden yang kita datangi. Keterlibatan LMDH dan KTH ini sangatlah mutlak dibutuhkan oleh semua pihak, baik dari pihak Perhutani dan pihak anggota untuk berjalannya semua tahapan-tahapan yang ada di program PHBM. Dari pertanyaan bagaimana metode penyuluhan yang digunakan., keterlibatan dalam penentuan jenis tanaman, materi yang disampaikan dalam penyuluhan, dan tingkat kehadiran LMDH dan KTH. Dari situ kita bisa mengukur tingkat keterlibatan pihak LMDH dan KTH. Di bawah ini adalah tabel hasil analisa keterlibatan antara LMDH dan KTH dalam PHBM yang ada di desa Pait

Kegiatan yang pertama yang kita lihat utuk mengetahui keterlibatan LMDH dan KTH dalam PHBM adalah metode pnyuluhan. Metode penyuluhan ini nantinya menunjukkan bagaimana pihak LMDH bisa menjalankan rencana yang akan dilakukan di tahap perecanaan dan tahap pelaksanaan. Nantinya pihak LMDH mempunyai peran apa di setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Didalam metode penyuluhan ini nantinya anggota bisa menilai apakah dalam metode penyuluhan ini mudah diterima ataupun tidak bisa diterima oleh masyarakat anggota dari PHBM.

Dalam kenyataan di lapang tentang metode yang diberikan oleh pihak LMDH sudah bisa diterima dengan baik oleh anggota dari PHBM. Menurut

pemaparan dari responden pihak LMDH sudah bisa bagaimana meyakinkan anggota untuk trus aktif dalam kegiatan yang ada di PHBM. Selain itu masyarakat menganggap dengan adanya metode penyuluhan yang dilakukan oleh pihak LMDH ini bisa membantu mereka untuk mempertanyakan apa yang mereka belum ketahui selama ini tanpa harus menunggu lama untuk bertanya kepada pihak perhutani.

Kegiatan yang kedua untuk mengukur keterlibatan LMDH adalah proses penentuan jenis tanaman. Disini nantinya masyarakat berharap kepada pihak LMDH untuk bisa berperan aktif di dalam setiap proses penentuan jenis tanaman yang akan ditanam di area hutan masyarakat. Tanaman-tanaman yang di usulkan oleh pihak LMDH bisa mewakili apa yang selama ini diharapkan oleh masyarakat anggota dari PHBM.

Dari hasil realita yang ada dilapang untuk proses penentuan jenis tanaman pihak LMDH belum terlibat sama sekali. Ini terbukti bahwa setiap jenis tanaman yang akan ditanam dilahan yang dikelola perhutani, maka pihak dari perhutani sudah memiliki rencana tanaman apa yang akan ditanam di lahan tersebut. Inilah yang membuktikan bahwa LMDH belum mempunyai peran dalam proses penentuan jenis tanaman. Pihak LMDH hanya sebatas penjebaran dari perhutani untuk menyampaikan segala informasi yang ada.

Kegiatan yang ketiga adalah kesesuaian materi yang diberikan oleh pihak LMDH dalam program PHBM. Materi-materi yang diberikan oleh pihak lembaga harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat anggota didalam proses keberlangsungan program PHBM. Dalam prosesnya nanti pihak LMDH diharapkan bisa saling berkomunikasi dengan pihak perhutani agar apa yang disampaikan oleh LMDH tidak melenceng jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak perhutani.

Sesuai dengan apa yang ada dilapang dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh pihak LMDH bahwa materi yang di gunakan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak perhutani hal ini terbukti dengan penyampaian-penyampaian pada waktu perencanaan dan pelaksanaan di setiap pertemuan rutin yang dilakukan oleh anggota dan pengurus PHBM.

Kegiatan yang terakhir adalah bagaimana intensitas kehadiran dari pihak LMDH dalam setiap kegiatan baik itu di dalam kegiatan perencanaan maupun pada kegiatan pelaksanaan. Dari olah data yang kita dapat dari responden, bahwa pihak LMDH selalu terlibat dalam seluruh kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan program PHBM. Walaupun kadang pihak LMDH tidak bisa hadir mereka berusaha untuk melakukan kegiatan penyuluhan personal ke anggota-anggota PHBM. Di bawah ini kita bisa melihat seberapa besar keterlibatan LMDH dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan di dalam program PHBM.

Tabel 36: Tingkat Partisipasi LMDH dalam PHBM

<b>Tingkat Partisipasi Dalam PHBM</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Responden terlibat</b>	<b>Responden tidak terlibat</b>	<b>(%)</b>
Terlibat 1 kegiatan	41	41	0	100
Terlibat 2 kegiatan	41	41	0	100
Terlibat 3 kegiatan	41	41	0	100
Terlibat 4 kegiatan	41	1	39	3

Sumber : Data Primer, diolah 2013

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi LMDH dalam setiap kegiatan PHBM. Tingkat partisipasi di sini kita lihat dari kegiatan metode penyuluhan yang diberikan LMDH, keikutsertaan dalam proses penentuan jenis tanaman, metode yang diberikan LMDH dalam setiap pertemuan, dan kehadiran pihak LMDH dalam setiap kegiatan di atas bisa kita lihat bahwa dari 41 anggota yang dijadikan sampel terlibat dalam 3 kegiatan atau sebesar 100% responden yang kita wawancarai mengatakan pihak LMDH ikut serta dalam kegiatan PHBM. Menurut responden pihak LMDH hanya tidak ikut dalam proses penentuan jenis tanaman. Hal itu dikarenakan proses penentuan jenis tanaman merupakan kewajiban penuh dari pihak perhutani selaku lembaga yang menaungi hutan yang ada di desa Pait.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh LMDH, pihak KTH juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti di atas mulai dari metode penyuluhan, penentuan jenis tanaman, kesesuaian materi yang diberikan dalam setiap kegiatan penyuluhan, dan kehadiran KTH di setiap penyuluhan. Di bawah ini bisa kita lihat tabel tingkat partisipasi KTH dalam setiap kegiatan di PHBM.

Tabel 37: Tingkat Partisipasi KTH

No	Keterlibatan KTH	Jawaban	$\Sigma$	(%)
1	Memberi penyuluhan	Mudah diterima	41	100
		Sulit diterima	0	0
		Tidak bisa diterima	0	0
2	Proses pemilihan jenis tanaman	Ikut membantu	0	0
		Kadang membantu	0	0
		Tidak pernah membantu	41	100
3	Kesesuaian materi dengan kebutuhan anggota	Sesuai	21	51
		Ada yang sesuai	20	49
		Tidak sesuai	0	0
4	Intensitas kehadiran penyuluh	Sering	0	0
		Jarang	41	100
		Tidak pernah membantu	0	0

Sumber: Data Primer, diolah 2013

Tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan pihak LMDH. Pihak KTH juga melakukan kegiatan kegiatan yang sama mulai dari metode penyuluhan, proses pemilihan jenis tanam, kesesuaian materi dengan kebutuhan anggota, dan intensitas kehadiran penyuluh. Dalam metode penyuluhan sebesar 100%. Namun tidak diikuti pada tahap proses pemilihan jenis tanaman. Pada penentuan jenis tanaman ini yang berperan adalah pihak Perhutani sehingga presentase KTH pada tahap ini sebesar 0% atau tidak terlibat sama sekali. Pada tahap kesesuaian materi yang digunakan sebanyak 51% responden menjawab sesuai dan 49% menjawab ada yang sesuai. Sedangkan data intensitas kehadiran pihak KTH dalam penyuluhan 100% menjawab jarang. Inilah yang membedakan intensitas kehadiran pihak LMDH dengan pihak KTH. Diduga karena kurangnya dana operasional yang didapat oleh KTH inilah yang menyebabkan intensitas KTH berbeda dengan KTH. Ini menyebabkan tingkat kepercayaan antara LMDH dan KTH menjadi lebih tinggi kepada LMDH. Seharusnya kedua elemen masyarakat ini bisa saling kordinasi dalam tingkat kehadiran, sehingga tidak ada mis komunikasi di tingkat kehadiran setiap kegiatan pertemuan maupun penyuluhan yang diadakan.

